

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PERILAKU PEMILIH PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD
DAN DPRD TAHUN 2014
DI JAKARTA SELATAN**

Disusun Oleh:

Tim Peneliti
Pusat Kajian Politik
Departemen Ilmu Politik - FISIP Universitas Indonesia
(PUSKAPOL FISIP UI)

Jakarta, 30 Juli 2015



DAFTAR ISI

Bab I.

Pendahuluan.....4

 A. Latar Belakang.....4

 B. Rumusan Permasalahan.....5

 C. Metode Penelitian.....7

Bab II.

Analisis Suara Pemilih pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 di Jakarta Selatan.....11

 A. Karakteristik Penduduk Kota Jakarta Selatan.....12

 B. Analisis Suara Pemilih di Jakarta Selatan untuk DPR, DPD, dan DPRD DKI.13

 B.1. Analisis Suara Pemilih untuk DPR RI.....15

 B.2. Analisis Suara Pemilih untuk DPD RI.....16

 B.3. Analisis Suara Pemilih untuk DPRD DKI Jakarta (Dapil 7 dan 8).....17

 C. Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014 di Jakarta Selatan.....19

 D. Program Sosialisasi Pemilu 2014 di Jakarta Selatan.....22

Bab III.

Perilaku Memilih dan Persepsi Politik Pemilih tentang Perempuan Calon Anggota Legislatif pada Pemilu 2014 di DKI Jakarta.....25

 A. Pendahuluan.....25

 B. Temuan Survei.....27

 B.1. Perilaku Pemilih: Potensi Keberpihakan terhadap Caleg Perempuan.....27

 B.2. Persepsi Politik Pemilih.....34

Bab IV.

Kesimpulan dan Rekomendasi.....41

Daftar Pustaka.....47

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Kriteria Informan Wawancara Mendalam.....	8
Tabel II.1. Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta 2009-2013.....	12
Tabel II.2. Tingkat Pengangguran Terbuka di DKI Jakarta 2011-2013.....	13
Tabel II.3. Jumlah Penduduk Miskin di DKI Jakarta 2009-2013.....	13
Tabel II.4. Persentase Suara untuk Caleg dan Partai Politik pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 di Jakarta Selatan.....	14
Tabel II.5. Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu di Jakarta Selatan Untuk Pemilu Anggota DPR 2014.....	16
Tabel II.6. Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu di Dapil 7 dan 8 Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilu Anggota DPRD DKI Jakarta.....	18
Tabel II.7. Perbandingan Suara Pemilih untuk Caleg Laki-laki dan Caleg Perempuan di Jakarta Selatan.....	19
Tabel II.8. Partisipasi Pemilih Perempuan dan Laki-Laki per Kecamatan di Jakarta Selatan pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 2014.....	20
Tabel II.9. Jumlah Suara Tidak Sah pada Pemilu 2014 di Jakarta Selatan.....	21
Tabel III.1. Karakteristik Responden dan Caleg yang Dipilih Responden.....	28
Tabel III.2. Waktu Pertama Kali Menentukan Caleg yang Akan Dipilih dilihat dari Jenis Kelamin, Usia dan Tingkat Pendidikan.....	33
Tabel III.3. Pendapat responden tentang kemampuan, kesempatan dan jaminan hak caleg perempuan dibandingkan caleg laki-laki untuk dipilih sebagai anggota Legislatif.....	35
Tabel III.4. Pengetahuan Responden terhadap Kampanye Caleg.....	36
Tabel III.5. Perbandingan Bentuk Kampanye Caleg Perempuan dan Caleg Laki-Laki.....	37
Tabel III.6. Sumber Informasi Utama Menentukan Pilihan.....	38
Tabel III.7. Cara Peningkatan Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR/DPRD Menurut Responden.....	41

DAFTAR BAGAN

Bagan II.1. Perbandingan Partisipasi Politik Pemilih Laki-laki dan Perempuan Pada Pileg dan Pilpres 2014.....	21
Bagan III.1. Perbandingan Jenis Kelamin Responden dalam Memilih Caleg.....	28
Bagan III.2. Alasan Responden Memilih Caleg.....	31
Bagan III.3. Penilaian Kualitas Caleg oleh Responden.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum memiliki dua makna bagi masyarakat Indonesia. Pertama, sebuah aktivitas politik lima tahunan yang rutin untuk memilih para pemimpin rakyat, telah berlangsung sebanyak sepuluh kali sejak pertama kali pada 1955 hingga pemilu 2014 yang baru saja selesai. Pengalaman pemilu-pemilu yang teratur diselenggarakan tersebut menyebabkan interaksi masyarakat dengan aktivitas pemilu relatif intens. Sehingga sebetulnya pemilih kita sudah sangat paham dengan penyelenggaraan tahapan terkait pemilu, misalnya pendaftaran pemilih, masa kampanye, dan pemungutan suara.

Melihat perkembangan pemilu-pemilu era reformasi yang pertama kali diselenggarakan pada 1999, selain keteraturan, pemilu juga dipahami sebagai ajang persaingan terbuka antarpeserta pemilu untuk memobilisasi dukungan suara pemilih dalam meraih kemenangan. Pada tataran ini, terjadilah interaksi relatif intens dan perubahan bentuk relasi/hubungan antara warga/pemilih dengan berbagai pihak terkait pemilu yaitu peserta pemilu (partai politik dan kandidat), pemerintah (pusat – daerah), penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan juga organisasi pemantau. Maka urusan pemilu kemudian tidak sekedar prosedural dan tata cara, tetapi juga urusan substansial menyangkut pertimbangan pemilih dalam melakukan dan menentukan keputusan politiknya.

Perubahan sistem pemilu dari proporsional tertutup yang berlaku selama pemilu-pemilu era Orde Baru menjadi proporsional semi terbuka pada pemilu awal reformasi (2004), lalu proporsional terbuka yang diterapkan pada dua kali pemilu terakhir (2009, 2014), menunjukkan adanya perubahan posisi pemilih terhadap peserta pemilu. Perubahan sistem pemilu dari tertutup ke terbuka tentu berpengaruh terhadap perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Dalam sistem pemilu proporsional tertutup --khususnya yang berlaku pada era Orde Baru -- pemilih diposisikan sebagai obyek pemenangan partai penguasa dengan mengandalkan birokrasi pemerintah. Para pemilu era Orde Baru, pemilih memilih tanda gambar partai, pemerintah berperan sebagai penyelenggara pemilu sekaligus peserta pemilu, mobilisasi politik sangat kuat, serta tidak adanya ruang membicarakan alternatif-alternatif pilihan politik secara bebas. Maka hubungan antara pemilih dengan peserta pemilu pun tidakimbang.

Situasi berubah setelah ada reformasi kepemiluan yang diamanatkan dalam perubahan konstitusi. Sejumlah perubahan atau koreksi dilakukan. Sistem pemilu dikoreksi dengan arah perubahan pada kedaulatan pemilih dan menempatkan pemilih pada posisi sentral dan penting. Hubungan antara pemilih dan partai politik peserta pemilu beserta para calonnya pun berubah. Hubungan yang tentu saja diharapkan setara karena pemilih memiliki kekuasaan untuk memberikan suaranya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, secara bebas, rahasia, dan otonom (tidak dimobilisasi).

Pemilih pun kemudian dihadapkan pada berbagai kepentingan secara bersamaan pada momen pemilu. Kepentingan penyelenggara pemilu meningkatkan angka partisipasi pemilih sebagai target utama; kepentingan caleg meraih suara terbanyak; kepentingan partai politik meraih kursi sebanyak-banyaknya; kepentingan lembaga pengawas pemilu mengurangi

kecurangan pemilu, dan sebagainya. Sementara kepentingan pemilih untuk memilih berdasarkan informasi memadai, akses terbuka terhadap rekam jejak calon/peserta pemilu, akses terbuka terhadap informasi kepemiluan, bebas dari intimidasi dan mobilisasi, cenderung tidak terkelola secara memadai, intensif, dan berkualitas. Hasilnya yang diamati adalah deretan daftar apatisme masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu, seperti ditunjukkan berbagai survei.

Hasil survei Puskapol UI pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2012 menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas politik yang ada. Mayoritas warga cenderung skeptis dengan pemilu, ditandai dengan: (1) tidak yakin bahwa hasil pemilu memiliki korelasi langsung dengan perubahan kondisi kesejahteraan mereka, (2) tidak yakin bahwa masalah-masalah warga akan terselesaikan melalui program yang ditawarkan pasangan calon/peserta pemilu, (3) melihat pemilu sebagai kegiatan rutin tanpa keterikatan dengan proses dan hasilnya, serta (4) cenderung permisif terhadap politik uang disebabkan kurang tersedianya mekanisme lain yang memadai dalam proses penentuan pilihan politik. Gambaran hasil survei tersebut memperlihatkan perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan situasi yang terjadi pada masa pra pemilu dan sebelum pemungutan suara.

B. Rumusan Permasalahan

Penelitian ini bertujuan dua hal; untuk memperoleh gambaran umum mengenai perilaku memilih pada Pemilu 2014, khususnya pemilu untuk memilih anggota DPR/DPD/DPRD (selanjutnya disebut pemilu legislatif) di wilayah Jakarta Selatan, dan memberikan rekomendasi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam merancang peraturan yang terkait dengan sosialisasi atau pendidikan pemilih. Perilaku pemilih yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menganalisis pilihan pemberian suara yang diberikan pemilih, yaitu suara untuk caleg atau partai politik sesuai amanat undang-undang. Hal ini menarik untuk dicermati mengingat adanya perubahan mendasar dalam sistem pemilu proporsional yang diterapkan di mana pemilih diberikan kebebasan untuk memberikan pilihan suaranya. Dalam sistem terbuka, diasumsikan pemilih memiliki kedaulatan dan akses yang luas untuk menentukan pilihannya di bilik suara. Sehingga secara normatif terbangun hubungan yang lebih kuat antara pemilih dengan caleg yang dipilihnya.

Studi perilaku pemilih di Indonesia sejak era reformasi semakin berkembang yang disebabkan oleh perubahan politik yang mendorong adanya reformasi kepemiluan. Jika pada era Orde Baru yang otoriter, studi perilaku pemilih bisa dianggap tidak relevan karena terjadi mobilisasi politik dan rekayasa dalam penyelenggaraan pemilu oleh rezim yang berkuasa sehingga perilaku pemilih tidak bisa digambarkan secara baik. Kondisi tersebut berbalik pada era demokrasi dewasa ini sehingga studi perilaku memilih kembali menemui relevansinya dalam konteks Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan munculnya berbagai survei mengenai perilaku pemilih dari berbagai lembaga survei, baik yang diadakan menjelang pemilu maupun setelah pemilu.

Demikian pula pada pelaksanaan pemilu 2014, berbagai lembaga survei merilis temuan-temuan pentingnya. Di antaranya adalah hasil survei nasional bertajuk “Persepsi dan Perilaku Masyarakat dalam Pemilu 2014”, dirilis oleh Poltracking pada Oktober 2013 lalu yang menyatakan bahwa 80% pemilih akan memberikan suaranya pada pemilu legislatif tahun 2014. Salah satu temuan survei ini yaitu sebanyak 69% responden menyatakan akan memilih caleg dibandingkan dengan partai politik. Responden yang menyatakan akan memilih partai politik hanya 12%. Temuan lainnya adalah sebanyak 34,3% responden akan memberikan suaranya kepada nama caleg sedangkan yang akan memberikan suaranya pada tanda gambar parpol

(28,7%), nomor urut caleg (16,8%) dan nomor urut parpol (6,2%). Hasil ini mengonfirmasi kecenderungan pemilih yang lebih banyak memilih caleg dibandingkan dengan partai politik pada Pemilu 2014.¹

Sementara itu hasil laporan survei nasional yang dirilis Cirrus Surveyor Group berjudul “Posisi Partai dan Capres Satu Bulan Menjelang Pemilu” yang dilaksanakan sebelum pemilu 2014 menyebutkan bahwa hampir semua responden (94.23%) akan menggunakan hak suaranya di TPS. Selain itu mayoritas responden menggunakan hak suaranya untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD pada pemilu nanti. Namun sebanyak 41.40% pemilih menyatakan kurang percaya terhadap partai politik dan hanya 16.46% percaya terhadap partai politik.²

Ada beberapa hal yang bisa dicatat terkait relevansi penelitian perilaku memilih pada era reformasi ini, yaitu: (1) desain reformasi sistem pemilu diarahkan untuk memperbaiki kondisi representasi politik atau hubungan yang lebih dekat antara pemilih dengan yang dipilih; (2) penyelenggaraan pemilu diserahkan pada sebuah lembaga yang mandiri, lepas dari intervensi pemerintah dan kekuatan politik lainnya, sehingga aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas lebih diutamakan; (3) dengan penyelenggaraan pemilu oleh lembaga yang mandiri, nasional, dan bersifat tetap maka akses pemilih terhadap pendidikan pemilih, sosialisasi pemilu, dan informasi pemilu akan lebih terjamin; (4) adanya jaminan atas kesetaraan dan keadilan bagi semua peserta pemilu dalam berkampanye dan menyebarluaskan program-program unggulan mereka. Dalam konteks situasi tersebut, pemilih berada pada kondisi yang bebas dalam membuat pertimbangan sehingga diharapkan kualitas pemilu dapat lebih baik.

Namun tentu saja kondisi ideal tersebut dalam realitanya masih menemui sejumlah kendala yang bisa memengaruhi keputusan pemilih. Salah satunya adalah fenomena politik uang yang makin meningkat pada pemilu-pemilu terakhir ini. Pemilih dihadapkan pada berbagai alternatif pilihan, sementara mekanisme untuk meneliti rekam jejak para kandidat belum tersedia dengan maksimal. Persaingan antar caleg dalam satu daerah pemilihan pun memicu meningkatnya praktik jual beli suara untuk meraih dukungan suara. Maka penelitian mengenai perilaku pemilih pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD ini ingin menjawab pertanyaan: *bagaimana gambaran umum perilaku pemilih di Jakarta Selatan dalam memberikan suara pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014?*

C. Metode Penelitian

Laporan penelitian ini terbagi atas dua hal; pertama adalah analisis suara pemilih pada pemilu anggota legislatif di Jakarta Selatan, dan bagian kedua adalah pemaparan hasil survei Puskapol mengenai perilaku memilih di DKI Jakarta pada pemilu 2014, khususnya perilaku pemilih dalam memilih caleg perempuan.

Penelitian ini menggunakan kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif dengan mengambil studi kasus untuk membahas perilaku pemilih pada Pemilu 2014. Studi kasus merupakan pendekatan atau strategi penelitian di mana peneliti menyelidiki secara cermat suatu aktivitas, proses, dan peristiwa. Kasus yang diteliti dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti

¹Laporan Survei Nasional “Kecenderungan Sikap dan Perilaku Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014” yang dirilis oleh Poltracking pada Desember 2013. Dapat diunduh melalui <http://poltracking.com/images/content/pdf/KECENDERUNGAN-PERILAKU-PEMILIH-DALAM-PEMILU-LEGISLATIF-2014.pdf>. Diakses pada 31 Juli 2015

²Laporan Survei Nasional “Posisi Partai dan Capres Satu Bulan Menjelang Pemilu 2014” dirilis oleh Cirrus Surveyor Group, dapat diunduh melalui <http://www.cirrus-sg.or.id/wp-includes/images/Laporan3-2014.pdf>. Diakses pada 31 Juli 2015

mengumpulkan data dan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell 2009: 20).

Pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum perilaku pemilih di tempat pemungutan suara, dengan membandingkan persentase jumlah pemilih yang mencoblos orang/nama caleg atau tanda gambar partai politik. Gambaran tersebut berguna untuk mengetahui bagaimana aspirasi pemilih terhadap suara yang diberikannya. Data kuantitatif diperoleh dengan melakukan pengolahan data terhadap data hasil perolehan suara pemilih pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang diselenggarakan pada 9 April 2014 lalu. Selain itu, untuk menelusuri perilaku pemilih yang memilih caleg, khususnya caleg perempuan, penelitian ini juga mengutip secara keseluruhan hasil riset yang dilakukan Puskapol FISIP UI mengenai perilaku memilih dan persepsi politik terhadap caleg perempuan di DKI Jakarta pada Pemilu 2014. Penelitian dengan metode survei tersebut melibatkan 520 responden, berdomisili di DKI Jakarta, dan memilih orang/caleg pada pemilu 2014 lalu.

Penelitian ini juga ditujukan untuk memperdalam dan mengonfirmasi temuan data kuantitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada sejumlah informan tertentu. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive*. Pemilihan informan dengan metode *purposive* ditujukan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan yang mampu menyediakan informasi atau memberikan pemahaman terkait dengan permasalahan yang diteliti (Ritchie dan Lewis 2003: 78). Secara umum, informan yang diwawancarai adalah penyelenggara pemilu dan para relawan demokrasi dari beragam kelompok. Berikut ini tabel informan yang menjadi informan penelitian ini:

Tabel I.1. Kriteria Informan Wawancara Mendalam

No.	Kategori Informan	Informasi yang dicari	Informan
1	Penyelenggara pemilu	- Program Sosialisasi yang telah dijalankan oleh KPU DKI dan KPU Jakarta Selatan pada pemilu 2014 - Hambatan KPU dalam menjalankan program sosialisasi - Perilaku Pemilih di Jakarta Selatan - Persiapan sosialisasi Pemilukada 2017 mendatang	- Anggota KPU DKI - Anggota KPU Jakarta Selatan
2	Komunitas Keagamaan	- Program sosialisasi yang dijalankan Relasi komunitas keagamaan pada Pemilu 2014 - Hambatan dalam menjalankan sosialisasi pemilu - Perilaku pemilih di Jakarta Selatan - Kampanye caleg di wilayahnya - Masukan terhadap program sosialisasi pada pemilu 2014 lalu dan untuk pemilukada 2017 mendatang	Perwakilan relawan demokrasi kelompok agama

No.	Kategori Informan	Informasi yang dicari	Informan
3	Komunitas Marjinal	- Program sosialisasi yang dijalankan relasi komunitas marjinal pada Pemilu 2014 - Hambatan yang dialami dalam menjalankan sosialisasi pemilu - Perilaku pemilih di Jakarta Selatan - Kampanye caleg di wilayahnya - Masukan terhadap program sosialisasi pada pemilu 2014 lalu dan untuk pemilukada 2017 mendatang	Perwakilan relawan demokrasi kelompok marjinal
4	Komunitas Perempuan	- Program sosialisasi yang dijalankan relasi komunitas perempuan pada Pemilu 2014 - Hambatan yang dialami dalam menjalankan sosialisasi tersebut - Perilaku pemilih di Jakarta Selatan - Kampanye caleg di wilayahnya - Masukan terhadap program sosialisasi pada pemilu 2014 lalu dan untuk pemilukada 2017 mendatang	Perwakilan relawan demokrasi kelompok perempuan
5	Komunitas Disabilitas	- Program sosialisasi yang dijalankan relasi komunitas disabilitas pada Pemilu 2014 - Hambatan dalam menjalankan sosialisasi tersebut - Perilaku pemilih di Jakarta Selatan - Kampanye caleg di wilayahnya - Masukan terhadap program sosialisasi pada pemilu 2014 lalu dan untuk pemilukada 2017 mendatang	Perwakilan relawan demokrasi kelompok disabilitas
6	Komunitas Pemilih Pemula	- Program sosialisasi yang dijalankan Relasi komunitas pemilih pemula pada Pemilu 2014 - Hambatan dalam menjalankan sosialisasi tersebut - Perilaku pemilih di Jakarta Selatan - Kampanye caleg di wilayahnya - Masukan terhadap program sosialisasi pada pemilu 2014 lalu dan untuk pemilukada 2017 mendatang	Perwakilan relawan demokrasi kelompok pemilih pemula

BAB II

ANALISIS SUARA PEMILIH PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 DI KOTA JAKARTA SELATAN

Berkaitan dengan hasil pemilu, Puskapol FISIP UI melakukan pengumpulan data dan analisis tentang perolehan suara pemilih untuk memilih anggota DPR RI pada Pemilu 2014. Analisis perolehan suara dilakukan berdasarkan pengumpulan data rekapitulasi suara caleg DPR yang meliputi 75 daerah pemilihan dari 31 provinsi (kecuali Papua dan Papua Barat). Beberapa temuan menarik dari data perolehan suara tersebut adalah kekuatan partai politik di daerah pemilihan terpusat pada persaingan antara PDIP dan Golkar. PDIP sebagai pemenang pemilu, unggul dalam perolehan suara di 36 dapil, disusul Golkar yang unggul di 25 dapil. Berturut-turut partai lainnya: PKB unggul di 6 dapil, Gerindra dan Demokrat masing-masing unggul di 4 dapil, kemudian PAN dan Nasdem masing-masing unggul di 1 dapil. Sementara PKS, PPP, dan Hanura tidak unggul di seluruh dapil.

Temuan berikutnya adalah terkait pilihan pemilih untuk mencoblos tanda gambar partai atau nama caleg. Hasil pengolahan data terhadap suara pemilih menunjukkan mayoritas pemilih mencoblos nama caleg. Data menunjukkan lebih dari separo pemilih memberikan suara dengan mencoblos nama caleg (70%), sedangkan yang mencoblos tanda gambar partai politik adalah 30%. Kondisi tersebut hampir sama dengan hasil Pemilu 2009, yaitu 69.03% mencoblos caleg dan 30.96% untuk partai. Dalam dua kali pemilu, ada kecenderungan semakin meningkat pemilih yang memberikan suara untuk nama caleg pada surat suara.

Penelusuran lebih lanjut terhadap pemilih yang mencoblos caleg menunjukkan fenomena bahwa mayoritas pemilih mencoblos caleg laki-laki. Dari pemilih yang memberikan suara untuk caleg, sebagian besar memilih caleg laki-laki yaitu 76.69%. Sedangkan yang memberikan suara untuk caleg perempuan adalah 23.31%. Persentase perolehan suara caleg perempuan tersebut masih jauh dari pencalonan perempuan yang mencapai 37% pada Pemilu 2014 ini. Di sisi lain, sekalipun masih jauh lebih rendah dari suara yang diberikan untuk caleg laki-laki, jika dibandingkan data Pemilu 2009 maka ada peningkatan sedikit perolehan suara caleg perempuan (dari 22.45% menjadi 23.31%).

Data yang dijelaskan tersebut bersumber dari rekapitulasi perolehan suara pemilih untuk seluruh Indonesia. Lalu bagaimana kecenderungan perilaku pemilih di wilayah Jakarta Selatan, apakah memiliki tren yang mirip dengan kondisi nasional atau ada perbedaan? Bagian ini menjelaskan analisis suara pemilih di wilayah Jakarta Selatan, yang terbagi atas suara untuk DPR RI, DPD RI, dan DPRD DKI Jakarta. Penjelasan diawali dengan menggambarkan karakteristik penduduk di Jakarta Selatan.

A. Karakteristik Penduduk Kota Jakarta Selatan

Wilayah Jakarta Selatan terdiri dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Menurut data terakhir, jumlah penduduk Jakarta Selatan adalah 2.104.092 jiwa (20,88%)³. Wilayah dengan penduduk terpadat yaitu kecamatan Tebet (Jakarta Dalam Angka 2014). Jakarta Selatan termasuk wilayah dengan kondisi penduduknya yang memiliki nilai tinggi dalam indeks pembangunan manusia. Bahkan dapat dikatakan skor indeks pembangunan manusia penduduk Jakarta Selatan merupakan yang tertinggi di lingkup provinsi DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan kondisi kesejahteraan penduduknya relatif lebih baik dari wilayah lainnya di DKI Jakarta.

Tabel II.1.
Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta 2009-2013

Kabupaten/Kota Administrasi	Indeks Pembangunan Manusia				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kepulauan Seribu	70,50	70,82	71,16	71,45	71,73
Jakarta Selatan	79,26	79,47	79,82	80,17	80,47
Jakarta Timur	78,74	78,95	79,31	79,80	80,07
Jakarta Pusat	78,17	78,41	78,68	79,12	79,37
Jakarta Barat	78,63	78,84	79,09	79,43	79,69
Jakarta Utara	77,36	77,63	77,93	78,25	78,54
DKI Jakarta	77,36	77,60	77,97	78,33	78,59

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, diunduh melalui <http://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/59>

Data tabel diatas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir tepatnya sejak tahun 2009, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Jakarta Selatan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 angkanya ada di 79,26 kemudian meningkat terus menjadi 80,47 di tahun 2013. Hal ini menjadikan Jakarta Selatan memiliki IPM tertinggi jika dibandingkan kota administratif lainnya di provinsi DKI Jakarta. Bahkan merupakan kota dengan IPM tertinggi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Jakarta Selatan sangat baik.

Seiring dengan data indeks pembangunan manusia, data BPS juga mengonfirmasikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jakarta Selatan yang mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga 2013 lalu. Tabel berikut ini menginformasikan hal tersebut.

Tabel II.2.
Tingkat Pengangguran Terbuka di DKI Jakarta 2011-2013

Kabupaten/Kota Administrasi	Tingkat Pengangguran Terbuka		
	2011	2012	2013
Kepulauan Seribu	11.38	13.97	6.03
Jakarta Selatan	10.36	8.96	8.56
Jakarta Timur	10.95	10.39	9.47

³Lihat *DKI Jakarta Dalam Angka 2014*, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Diunduh melalui http://jakarta.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Statistik-Daerah--Provinsi-DKI-Jakarta-2014.pdf

Jakarta Pusat	11.21	10.72	8.6
Jakarta Barat	10.72	9.31	8.69
Jakarta Utara	10.98	10.33	9.67
DKI Jakarta	10.8	9.87	9.02

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, diunduh melalui <http://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/85>

Tabel diatas menginformasikan tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Angka TPT di Jakarta Selatan pada tahun 2011 sebesar 10,36%. Sementara pada tahun 2012 angkanya turun menjadi 8,96% dan terus mengalami penurunan pada 2013 menjadi 8,56%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak angkatan tenaga kerja yang terserap ke lapangan kerja di wilayah Jakarta Selatan.

Tabel II.3.
Jumlah Penduduk Miskin di DKI Jakarta 2009-2013

Kabupaten/Kota Administrasi	Penduduk Miskin (ribu)				
	2009 ¹⁾	2010 ¹⁾	2011 ²⁾	2012 ²⁾	2013 ³⁾
2,47	2,4	2,7		2,6	2,5
Jakarta Selatan	73,7	78,4	71,84	74,1	74,6
Jakarta Timur	81,2	91,6	83,82	86,5	86,8
Jakarta Pusat	32,1	35,7	32,63	33,6	33,6
Jakarta Barat	74,0	87,2	79,71	82,3	83,2
Jakarta Utara	76,2	92,6	84,73	87,2	90,9
DKI Jakarta	339,6	388,2	355,20	366,3	371,7
Catatan : ¹⁾ Keadaan Juli					
²⁾ Keadaan September					

SumberData : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, diunduh melalui <http://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/53>

Tabel diatas menginformasikan tentang data jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada 2009 hingga 2013.Selama 5 tahun jumlah penduduk miskin di Jakarta Selatan sempat mengalami kenaikan dan penurunan.Pada tahun 2009, Jakarta Selatan menempati posisi ke empat dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 73,700 jiwa.Pada tahun 2010 jumlahnya bertambah menjadi 78,400 jiwa.Namun pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 71,840 jiwa. Akan tetapi dalam dua tahun berikutnya jumlahnya naik menjadi 74,100 jiwa di 2012 dan 74,600 jiwa pada tahun 2013. Satu tahun menjelang pemilu jumlah penduduk miskin di Jakarta Selatan cenderung mengalami kenaikan.

Mengacu pada informasi tiga tabel tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa kesejahteraan penduduk di kota Jakarta Selatan berada pada tingkatan di atas rata-rata dibandingkan wilayah lain di DKI Jakarta. Kondisi tersebut secara teoritis dianggap memiliki pengaruh pada kecenderungan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya.Namun penelitian ini tidak bisa mencakup informasi mengenai pengaruh tersebut karena keterbatasan metode penelitian dan sumber daya lainnya.Gambaran kondisi kependudukan tersebut berguna dalam menganalisis temuan penelitian yang terkait dengan gambaran umum suara pemilih dalam memilih anggota legislatif.

B. Analisis Suara Pemilih di Jakarta Selatan untuk DPR, DPD, dan DPRD DKI

Secara umum pengolahan data terhadap suara pemilih di daerah pemilihan Jakarta Selatan menunjukkan kecenderungan yang sama dengan data nasional. Data menunjukkan untuk memilih anggota DPR dan DPRD, rata-rata pemilih mencoblos caleg daripada tanda gambar partai politik. Tabel berikut menginformasikan data tersebut.

Tabel II.4
Persentase Suara untuk Caleg dan Partai Politik pada
Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 di Jakarta Selatan

No.	Pemilu	Persen Suara untuk Caleg	Persen Suara untuk Partai Politik
1.	DPR RI	51,70%	48,30%
2.	DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 7	60,25%	39,75%
3.	DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 8	59,79%	39,25%

Sumber Data: KPU Kota Jakarta Selatan, diolah oleh Puskapol FISIP UI

Tabel diatas menunjukkan bahwa lebih banyak pemilih yang memberikan suaranya untuk caleg dibandingkan ke partai politik. Pada pemilu untuk memilih anggota DPR RI, persentasenya tidak terlalu jauh berbeda antara yang mencoblos caleg (51,70%) dan memberikan suara pada partai politik (48,30%). Hal itu dapat ditafsirkan bahwa pengenalan pemilih terhadap caleg untuk DPR cenderung rendah, sehingga pilihan lebih mudah diberikan untuk partai politik. Kondisi berbeda ditemukan pada pemilihan anggota DPRD DKI Jakarta. Ada perbedaan yang jauh antara suara untuk caleg dengan suara pemilih untuk partai politik. Sebagian besar pemilih dalam memilih anggota DPRD DKI memberikan suara untuk caleg (dapil 7 ada 60%, dapil 8 ada 59,70%). Bisa ditafsirkan bahwa intensitas pengenalan dan sosialisasi caleg DPRD DKI lebih tinggi ketimbang caleg DPR.

B.1. Analisis Suara Pemilih untuk DPR RI

Untuk tingkatan DPR RI, jumlah caleg yang mencalonkan diri pada pemilu lalu di dapil Jakarta Selatan berjumlah 84 caleg. Terdiri dari 37 caleg perempuan (44%) dan 47 caleg laki-laki (56%). Dari jumlah tersebut, caleg yang terpilih berjumlah 21 orang, terdiri dari 21 orang laki-laki (81%) dan hanya 4 orang perempuan (19%).

Berdasarkan data analisis perolehan suara, sebanyak 48,30% pemilih memberikan suaranya ke partai politik, dan sebesar 51.70% memberikan suara ke caleg. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hampir berimbang antara pemilih yang memberikan suaranya untuk partai politik dan caleg. Dari jumlah pemilih yang memberikan suara kepada caleg, mayoritas memberikan suara untuk caleg laki-laki yaitu sebesar 65,17%. Sementara itu yang memberikan suara untuk calon perempuan sebesar 34,89%.

Partai politik yang mendapatkan perolehan suara terbanyak adalah PDI-P dengan 237.013 suara (24.56%). Kemudian Gerindra menjadi partai terbanyak kedua dengan 155.423 suara (16,10%) dan PKS dengan 145.549 suara (15.08%). Data lengkapnya dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel II.5.
Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu di Jakarta Selatan
Untuk Pemilu Anggota DPR 2014

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Persen
1	PDIP	237.013	24.56
2	GERINDRA	155.423	16.10
3	PKS	145.549	15.08
4	PPP	108.650	11.26
5	GOLKAR	68.594	7.11
6	DEMOKRAT	61.859	6.41
7	HANURA	57.226	5.93
8	PKB	55.564	5.76
9	PAN	33.542	3.48
10	NASDEM	26.810	2.78
11	PBB	10.450	1.08
12	PKPI	4.474	0.46

Sumber Data: KPU Kota Jakarta Selatan, diolah oleh Puskapol FISIP UI

B.2. Analisis Suara Pemilih untuk DPD RI

Untuk pemilihan anggota DPD, terdapat 35 orang yang dicalonkan dari dapil Jakarta Selatan yang terdiri dari 32 orang laki-laki (81%), dan hanya 3 orang perempuan (9%). Dari 4 orang calon anggota DPD yang terpilih, terdapat satu orang perempuan yang memperoleh suara terbanyak untuk dapil Jakarta Selatan yaitu sebesar 121.657 suara.

Hasil analisa perolehan suara menunjukkan untuk pemilihan anggota DPD, total suara sahnya yaitu 884.837 suara. Sebanyak 180.415 suara (20,39%) merupakan suara untuk calon perempuan dan 704.431 suara (79,61%) diberikan kepada calon anggota DPD yang laki-laki. Kondisi ini menarik untuk dicermati karena secara persentase, pencalonan perempuan hanya 9% namun perolehan suara untuk calon perempuananggota DPD cukup tinggi yaitu 20%.Hal ini disebabkan oleh perolehan suara tertinggi pemilihan anggota DPD di Jakarta Selatan diraih oleh Fakhira Idris dengan 121.657 suara. Calon terpilih dengan suara terbanyak kedua yaitu AM Fatwa dengan 105.330 suara, dan ditempat ketiga terbanyak adalah Abdul Azis Kaifa dengan 74.865 suara. Sejumlah 67,43% suara untuk calon perempuan disumbang oleh Fakhira Idris.

Jika dilihat data per kecamatan, di KecamatanCilandak hanya 3% pemilih yang memberikan suaranya kepada perempuan calon anggota DPD.Sementara sebagian besarnya (97%) memilih calon laki-laki.Sedangkan untuk kecamatan lainnya persentase pemilih yang memberikan suara ke calon perempuan berkisar antara 18%-29%.

B.3. Analisis Suara Pemilih untuk DPRD DKI Jakarta (Dapil 7 dan 8)

Untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, wilayah Jakarta Selatan dibagi dalam dua dapil yaitu dapil 7 dan dapil 8.Masing-masing dapil terdiri dari kecamatan yang berbeda.Untuk dapil 7 wilayahnya meliputi Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggrahan, dan Setiabudi.Sedangkan wilayah dapil 8 melliputi kecamatan Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Jagakarsa, dan Tebet.

Untuk dapil 7, total terdapat 120 caleg yang mencalonkan diri. Dari jumlah tersebut terdapat 41 orang caleg perempuan (34,16%) dan 79 orang caleg laki-laki (65.83%). Total kursi yang tersedia di dapil ini adalah 10 kursi. Rincian partai yang memperoleh kursi dari dapil 7 adalah PKS 1 kursi, PDI-P 3kursi, Golkar 1 kursi, Gerindra2 kursi, Demokrat 1 kursi, PPP mendapat 1 kursi, dan Hanura1 kursi. Partai yang tidak memperoleh kursi di dapil ini yaitu Nasdem, PKB, PBB, dan PKPI. Di dapil 7 lebih banyak pemilih yang memberikan suaranya ke caleg yaitu 60,25% dibandingkan dengan yang ke partai politik yaitu sebesar 39,75%. Dari jumlah pemilih yang memberikan suaranya ke caleg, sebanyak 23,41% memilih caleg perempuan, dan sebagian besar memilih caleg laki-laki sebesar 76,59%.

Untuk pemilu anggota DPRD DKI di dapil 7, calon terpilih dengan suara terbesar yaitu Asraf Ali dari Partai Golkar dengan 20.730 suara. Total suara partai Golkar dan caleg di dapil 7 yaitu 43.118 suara. Ini setara dengan 48% total suara partai Golkar yang berasal dari suara caleg Asraf Ali.

Berikutnya adalah dapil 8 dengan total 144 caleg yang berkontestasi di dapil ini, terdiri dari 94 orang laki-laki (65,27%) dan 50 orang perempuan (34,72%). Total kursi yang diperebutkan di dapil ini sebanyak 12 kursi. Rincian partai politik yang memperoleh kursi DPRD DKI dari dapil 8 yaitu PKB meraih 1 kursi, PKS2 kursi, PDI-P 3 kursi, Golkar 1 kursi, Gerindra2 kursi, Demokrat, PPP dan Hanura masing-masing memenangkan satu kursi. Partai politik peserta pemilu yang tidak memperoleh kursi di dapil 8 adalah Nasdem, PAN, PBB dan PKPI.

Mayoritas pemilih memberikan suaranya ke caleg yaitu sebesar 59,79%.Sedangkan yang memberikan suara untuk partai politik sebesar 39,25%. Dari jumlah pemilih yang memberikan suara ke caleg, mayoritas memilih caleg laki-laki yaitu sebesar 73,93%. Sementara yang memberikan suara ke caleg perempuan hanya sebesar 26,07%.

Tabel II.6.
Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu di Dapil 7 dan 8
Kota Jakarta SelatanUntuk Pemilu Anggota DPRD DKI Jakarta

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara			
		Dapil 7	%	Dapil 8	%
1	Nasdem	13.386	2.98	15.308	2.88
2	PKB	18.583	4.13	32.505	6.12
3	PKS	48.082	10.70	65.002	12.25
4	PDIP	113.136	25.17	117.317	22.11
5	Golkar	43.118	9.59	60.859	11.47
6	Gerindra	85.908	19.11	63.815	12.02
7	Demokrat	29.128	6.48	35.193	6.63
8	PAN	12.164	2.71	17.656	3.33

9	PPP	45.609	10.15	63.497	11.96
10	Hanura	30.301	6.74	49.526	9.33
11	PBB	7.989	1.78	5.982	1.13
12	PKPI	2.139	0.48	4.050	0.76
Total Suara		449.543		530.710	

Sumber Data: KPU Kota Jakarta Selatan diolah oleh Puskapol FISIP UI

Tabel diatas menunjukkan perolehan suara partai politik dalam pemilu anggota DPRD DKI Jakarta di dapil 7 dan 8 kota Jakarta Selatan. Total suara untuk dapil 7 adalah 449.543 dan dapil 8 yaitu 530.710 suara. Partai politik peserta pemilu yang memperoleh persentase suara tertinggi, baik di dapil 7 maupun dapil 8, adalah PDI-P dengan persentase 25,17% dan 22,11%. Partai dengan perolehan suara terbanyak kedua yaitu Gerindra dengan 19,11% di dapil 7. Namun di dapil 8 partai ini menempati urutan ketiga dengan 12.02%.Urutan keduanya adalah PKS dengan perolehan suara sebanyak 12.25%. Partai dengan persentase suara terbesar ketiga di dapil 7 adalah PKS dengan 10,70% dan peringkat keempat di dapil 8 adalah partai Golkar dengan 11,47% suara.

Merujuk pada data perolehan suara pemilih yang diberikan untuk caleg, baik untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, terdapat konsistensi mayoritas suara pemilih diberikan untuk caleg laki-laki.Namun untuk pemilu anggota DPR, suara yang diberikan pemilih untuk caleg perempuan lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Lengkapnya simak informasi tabel berikut ini:

Tabel II.7.
Perbandingan Suara Pemilih untuk Caleg Laki-laki dan Caleg Perempuan
di Jakarta Selatan

Legislatif	Suara Pemilih untuk	
	Caleg Laki-laki	Caleg Perempuan
DPR RI	65,17%	34,89%
DPD RI	79,61%	20,39%
DPRD DKI Dapil 7	76,59%	23,41%
DPRD DKI Dapil 8	73,93%	26,07%

Sumber Data: KPU Kota Jakarta Selatan, diolah oleh Puskapol FISIP UI

Berdasarkan wawancara mendalam kepada sejumlah informan yang mewakili tokoh masyarakat, umumnya berpendapat bahwa signifikannya suara pemilih untuk caleg disebabkan ada kejelasan dari sisi pemilih suaranya diberikan untuk caleg yang dikehendaknya, daripada suara diberikan untuk partai yang tidak bisa dipastikan nantinya suara untuk caleg yang mana.Alasan lainnya karena caleg yang turun langsung ke masyarakat sehingga masyarakat akan lebih ingat kepada caleg dibandingkan dengan program partai politik. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada partai yang bersih sehingga lebih memilih caleg yang bisa ditagih janjinya semasa kampanye.Lain halnya dengan alasan yang memilih partai politik yaitu karena tidak mengenal caleg yang berkompetisi di wilayahnya.

C. Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014 di Jakarta Selatan

Jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah Jakarta Selatan pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD lalu yaitu 1.605.194 pemilih.Sementara yang menggunakan hak pilihnya sebesar 1.037.996 pemilih atau setara dengan 65%. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yaitu sebanyak 567.198 orang. Hal ini berarti angka ‘golputnya’ cukup tinggi yaitu mencapai 35%. Untuk partisipasi pemilih perempuan adalah 68%,berselisih lebih banyak jika dibandingkan dengan pemilih laki-laki yaitu mencapai 62%.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar ada di kecamatan Pasar Minggu yaitu sebanyak 227.163 orang, disusul Kebayoran Baru sebanyak 223.158 pemilih. Pemilih tambahan terbanyak ada di kecamatan Pesanggrahan yaitu sebanyak 12.930 orang. Peringkat keduanya yaitu Kebayoran Lama dengan 12.791 orang. Namun persentase ‘golput’ terbesar ada di Kebayoran Lama yaitu 38%. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KPU Jakarta Selatan, untuk wilayah ini pemilihnya memang sedikit karena banyak yang sudah tidak tinggal di wilayah tersebut namun masih tercatat di kependudukan.

Tabel II.8.
Partisipasi Pemilih Perempuan dan Laki-Laki per Kecamatan di Jakarta Selatan
padaPemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 2014

No.	Kecamatan	Pemilih Laki-Laki	Pemilih Perempuan
1	Cilandak	60%	65%
2	Keb. Baru	58%	64%
3	Keb. Lama	59%	64%
4	Pesanggrahan	65%	71%
5	Setiabudi	60%	65%
6	Mampang Prapatan	63%	68%
7	Pancoran	63%	70%
8	Pasar Minggu	60%	67%
9	Jagakarsa	65%	71%
10	Tebet	63%	69%

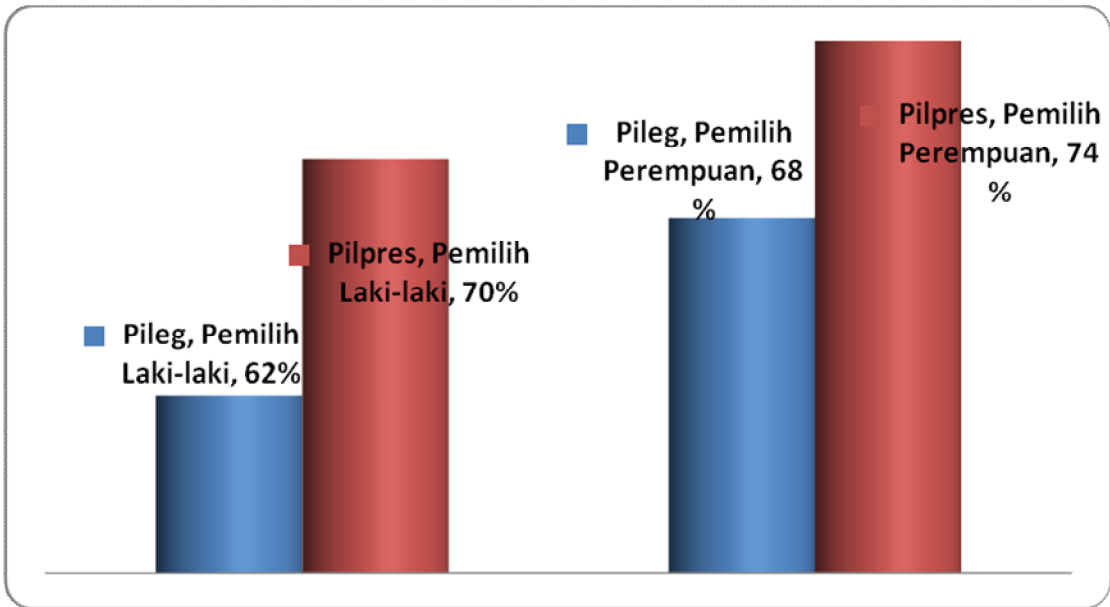
Sumber Data:KPU Kota Jakarta Selatan, diolah oleh Puskapol FISIP UI

Data diatas menunjukkan tingkat partisipasi pemilih perempuan dan laki-laki dari tiap kecamatan di Jakarta Selatan. Partisipasi pemilih perempuan cenderung lebih besar dibandingkan dengan pemilih laki-laki, meskipun perbedaan jumlah presentasenya tidak terlalu signifikan.Persentase partisipasi pemilih perempuan yang tertinggi ada di kecamatan Pesanggrahan dan Jagakarsa dengan 71%. Sedangkan yang terendah di Kebayoran Baru dan Kebayoran Lama yaitu masing-masing 64%. Persentase partisipasi pemilih laki-laki tertinggi ada di Jagakarsa dan Pesanggarahan dengan 65%, dan yang terendah di Kebayoran Baru mencapai 58%. Presentase ‘golput’ tertinggi terdapat di kecamatan Kebayoran Lama yaitu sebesar 38% atau setara dengan 87.406 orang dari 228.713 pemilih yang terdaftar.

Jika dibandingkan partisipasi pemilih pada saat pemilu anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), ternyata pemilih perempuan cenderung lebih aktif menggunakan hak pilih daripada pemilih laki-laki.Rata-rata partisipasi pemilih pada saat pilpres lebih tinggi daripada pileg, mencapai 70an persen, bandingkan dengan partisipasi pemilih pada pileg yang

rata-rata 60an persen. Secara umum tingkat partisipasi pemilih pada saat pemilihan presiden (pilpres) adalah sebesar 71,63%. Untuk tingkat partisipasi pemilih laki-laki adalah 69,38%, sedangkan partisipasi perempuan sebesar 74%. Kondisi ini menunjukkan partisipasi politik pemilih perempuan pada saat pilpres dan pileg lebih baik dibandingkan dengan pemilih laki-laki.

Bagan II.1
Perbandingan Partisipasi Politik Pemilih Laki-laki dan Perempuan
Pada Pileg dan Pilpres 2014



Terakhir yang terkait dengan partisipasi pemilih adalah informasi surat suara tidak sah yang tercatat pada pemilu 2014 di Jakarta Selatan. Berdasarkan data KPU Jakarta Selatan, persentase surat tidak sah untuk DPD lebih besar (14,59%) dibandingkan dengan pemilu DPR, DPRD DKI, dan pemilu presiden. Untuk pemilu DPR, persentase surat tidak sah hanya 8%, kemudian pemilu DPRD DKI yaitu 5,5%-6%. Sementara itu persentase surat tidak sah untuk pilpres sangat kecil yaitu kurang lebih satu persen.

Tabel II.9.
Jumlah Suara Tidak Sah pada Pemilu 2014 di Jakarta Selatan

No.	Surat Suara	Jumlah suara tidak sah
1	Anggota DPR	72.832 (8%)
2	Anggota DPD	151.484 (14.59%)
3	Anggota DPRD DKI Dapil 7	26.296 (5.52%)
4	Anggota DPRD DKI Dapil 8	31.447 (5.59%)
5	Pilpres	53.747 (0,98%)

Sumber Data: KPU Kota Jakarta Selatan, diolah oleh Puskapol FISIP UI

Tingginya persentase surat tidak sah untuk memilih anggota DPD dibanding memilih anggota DPR dan DPRD menunjukkan fenomena penting yang perlu dicermati. Ada beberapa dugaan yang bisa menjelaskan tingginya persentase tersebut. Hal pertama yang bisa dianggap faktor penyebab adalah pemilih tidak memiliki informasi yang cukup memadai untuk memilih calon anggota DPD. Kekurangan informasi memadai mengenai calon DPD bisa disebabkan banyaknya jumlah calon anggota DPD yang berkompetisi. Sebagai misal pada pemilu 2014 ini, di DKI Jakarta terdapat 35 orang calon anggota DPD. Dengan jumlah yang banyak tersebut

membuat pemilih kesulitan membuat pertimbangan sebelum memilih sehingga pemilih akan cenderung membiarkan surat suaranya kosong.

Hal lain sebagai faktor penyebab adalah kegiatan sosialisasi KPU yang cenderung bersifat umum, dengan penekanan materi pada teknis penyelenggaraan pemilu seperti pendaftaran pemilih, cara mencoblos, dan tanggal-tanggal penting yang harus diingat pemilih, sementara masih kurang menyosialisasikan mengenai calon anggota legislatif khususnya DPD yang calon perseorangan. Jika caleg masih bisa dipromosikan oleh partai politik sebagai yang mencalonkan. Sedangkan calon anggota DPD yang merupakan calon perseorangan harus aktif melakukan kampanye dan sosialisasi programnya kepada para pemilih.

Tingginya surat suara tidak sah untuk anggota DPD bisa juga disebabkan kurang pahami masyarakat secara umum terhadap fungsi dan peran lembaga DPD RI. Secara ketatanegaraan, DPD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya merupakan wakil dari tiap provinsi dengan tugas utamanya adalah menyalurkan aspirasi rakyat daerah ke dalam kebijakan publik. Selama ini memang masih ditemui persoalan mengenai kinerja anggota DPD yang belum dirasakan secara maksimal oleh rakyat di daerah sehingga belum memperoleh kepercayaan yang kuat dari rakyat. Dampaknya pada pemilihan anggota DPD, pemilih belum merasa 'memiliki' DPD sehingga muncul ketidaktahuan dalam memilih calonnya.

D. Program Sosialisasi Pemilu 2014 di Jakarta Selatan

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2014 sudah terjadwal bahwa program kegiatan sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, khususnya untuk KPU Kab/Kota dilaksanakan pada Juni 2012 sampai Juni 2014. Secara umum tahapan sosialisasinya meliputi pendaftaran, pemutakhiran daftar pemilih serta cara memilih dalam pemilu.

Dalam melakukan sosialisasi pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih, KPU Jakarta Selatan memberikan porsi khusus untuk wilayah Kalibata dan Pesanggrahan karena di daerah tersebut terdapat *grey area* yaitu wilayah yang mengalami penggusuran. Tempat yang termasuk *grey area* adalah apartemen Kalibata City di kelurahan Kalibata dan apartemen Gateway di kecamatan Pesanggrahan. Khusus di kedua wilayah tersebut, KPU Jakarta Selatan secara intensif melakukan sosialisasi pemutakhiran data pemilih dan tahapan pemilu. Program lainnya yang dilaksanakan KPU Jaksel yaitu melibatkan PPK dan PPS dalam konvoi mobil sosialisasi. KPU Kota diberikan 5 mobil yang berkeliling untuk mensosialisasikan program pemilu kepada masyarakat.

Sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial seperti facebook, twitter dan website. KPU Jaksel juga memanfaatkan forum-forum yang mereka hadiri sebagai narasumber, seperti seminar di kampus. Program lainnya adalah bekerjasama dengan radio Trisakti FM untuk membuat rangkaian acara *talkshow* dengan anggota KPU Jaksel sebagai narasumbernya, dan dalam acara tersebut disampaikan materi sosialisasi pemilu.

Selain itu ada juga program kerjasama dengan relawan demokrasi (relasi). Anggota relasi adalah masyarakat setempat yang secara sukarela mendaftarkan dirinya untuk terlibat menjadi relasi pemilu di wilayahnya masing-masing. Untuk Jakarta Selatan, pada awalnya ada 5 orang relasi yang masing-masing mewakili kelompok keagamaan, marjinal, disabilitas, pemilih pemula, dan kelompok perempuan. Namun dalam perjalanannya anggota relasi ditambah

jumlahnya menjadi total 16 orang, yang terdiri dari 4 orang untuk kelompok keagamaan, 4 orang untuk kelompok marjinal, 4 orang untuk pemilih pemula, 2 orang untuk kelompok perempuan, dan 2 orang untuk kelompok disabilitas. Mereka bekerja secara khusus untuk kelompoknya masing-masing namun ada juga beberapa kegiatan yang melibatkan massa dari kelompok lainnya.

Masing-masing relawan demokrasi memiliki kegiatan yang berbeda namun secara garis besar kegiatannya sama yaitu melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat. Relasi kelompok keagamaan misalnya memanfaatkan pertemuan forum pengajian di majelis taklim, pertemuan pada saat ibadah mingguan di gereja, serta acara besar keagamaan seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj untuk sosialisasi tentang teknis pemilu. Materi yang disampaikan adalah seputar sosialisasi waktu pelaksanaan pemilu dan bagaimana cara memilih. Mereka juga membagikan materi sosialisasi kepada warga seperti brosur, pin, kaos, mug, dan jam dinding.

Berbeda dengan kelompok keagamaan, relasi kelompok marjinal menggunakan cara yang lebih kreatif lagi, salah satunya dengan membacakan puisi tentang demokrasi di ruang-ruang publik seperti di bus kota dan event-event yang diselenggarakan KPU Jaksel maupun masyarakat. Sasaran utama sosialisasi adalah pemulung, tukang ojek, pekerja seks komersial, anak jalanan dan penduduk miskin di Jakarta Selatan.

Sementara itu relasi kelompok pemilih pemula lebih banyak melakukan sosialisasi ke SMA dan Universitas yang ada di Jakarta Selatan karena sasaran utamanya adalah yang sudah berusia 17 tahun, memiliki KTP dan juga mahasiswa. Mereka sempat mengadakan pertemuan dengan perwakilan anggota OSIS dari seluruh SMA dan SMK di Jakarta Selatan yang berlokasi di SMK 57 Ragunan. Untuk sosialisasi pemilu di SMA dianggap lebih mudah karena dibantu juga oleh pihak sekolah yang mewajibkan siswanya mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Berbeda halnya dengan sosialisasi kepada mahasiswa yang dilakukan melalui diskusi kecil di kampus-kampus namun biasanya peserta yang hadir tidak banyak, hanya sekitar 10-20 orang mahasiswa. Selain itu sosialisasi melalui media sosial juga gencar dilakukan baik melalui twitter, email, mengunduh video kegiatan ke *youtube* dan *blog* khusus relasi komunitas. Mereka juga melakukan sosialisasi di pasar Tanah Abang, mall dan memanfaatkan kegiatan *car free day* setiap minggu pagi di daerah Sudirman. Dalam kegiatan tersebut relasi membagikan brosur tentang pemilu.

Untuk relasi kelompok perempuan banyak memanfaatkan forum PKK, pengajian dan acara besar keagamaan untuk menyampaikan materi sosialisasinya. Rata-rata untuk setiap pertemuan tatap muka dihadiri oleh 30-40 orang peserta yang mayoritas adalah ibu rumah tangga. Sementara itu untuk relasi kelompok disabilitas banyak melakukan pertemuan tatap muka dengan kelompok disabilitas lainnya. Pertemuannya lebih bersifat informal dengan mendatangi rumah makan atau tempat berkumpul pemilih disabilitas.

Ada sejumlah hambatan yang ditemui dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pemilu. Misalnya hambatan yang dihadapi kelompok relasi sangat beragam antara lain perizinan tempat, minimnya kehadiran peserta dalam pertemuan tatap muka, koordinasi kurang baik, dan kurangnya anggota relasi dengan 16 orang harus menangani 10 kecamatan. Selain itu singkatnya waktu sosialisasi dirasakan oleh relasi sehingga dirasakan program belum terlaksana dengan maksimal.

Hambatan lainnya adalah minimnya anggaran sosialisasi untuk pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD lalu. Jika dibandingkan anggaran sosialisasi pemilu pada DKI Jakarta, maka alokasi untuk pemilu lalu dianggap kecil. Hal ini berakibat pada terbatasnya kegiatan sosialisasi

yang dilaksanakan seperti pertemuan tatap muka hanya bisa dilaksanakan beberapa kali oleh KPU Jaksel dan tidak disemua kecamatan.

BAB III

PERILAKU MEMILIH DAN PERSEPSI POLITIK PEMILIH TENTANG CALEG PEREMPUAN PADA PEMILU 2014 DI DKI JAKARTA

A. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan mengenai temuan hasil survei Puskapol yang dilakukan setelah pemilu 2014 usai (Oktober 2014) yang terkait dengan perilaku pemilih dalam memilih caleg. Survei dengan metode kuantitatif, mewawancarai 520 responden dengan kriteria khusus yaitu memberikan suara pada caleg pada pemilu 2014. Survei ini menargetkan responden yang memilih caleg laki-laki dan caleg perempuan secara sama agar dapat dilakukan perbandingan persepsi antara pemilih yang mencoblos nama caleg perempuan dan caleg laki-laki. Hasil survei ini relevan untuk menambah penjelasan mengenai gambaran umum perilaku pemilih di DKI Jakarta, dan khususnya di kota Jakarta Selatan.

Hasil riset Puskapol tentang analisis suara hasil Pemilu 2014 menunjukkan beberapa fenomena menarik. *Pertama*, mayoritas pemilih (70%) mencoblos nama calon anggota legislatif (caleg) di surat suara, sisanya mencoblos tanda gambar partai politik. Artinya, sebagian besar pemilih cenderung lebih memerhatikan individu yang berkontestasi sebagai caleg dibandingkan partai politik yang ikut sebagai peserta pemilu. Hal ini merefleksikan kecenderungan lemahnya identifikasi pemilih terhadap partai politik.

Kedua, dari jumlah pemilih yang memberikan suara kepada caleg, mayoritas memberikan suara untuk caleg laki-laki yaitu sebesar 76.69%, dan sebagian kecil memberikan suara untuk caleg perempuan yaitu 23.31%. Hasil tersebut serupa dengan tren pemberian suara hasil Pemilu 2009 dimana suara pemilih untuk caleg perempuan adalah sejumlah 22.45%. Hal ini menunjukkan, meski kebijakan afirmatif mempertimbangkan 30% keterwakilan perempuan telah muncul dalam UU Pemilu, namun sasaran kebijakan tersebut masih jauh dari terpenuhi. Hal *ketiga*, tingginya perolehan suara untuk caleg laki-laki dibandingkan caleg perempuan ditemukan pada komposisi perolehan suara di nasional dan cenderung semakin tinggi di tingkat lokal. Hasil pemilu 2014 mencatat persentase keterwakilan perempuan di parlemen nasional mencapai 17%, sementara di parlemen daerah (tingkat provinsi) yang rata-rata mencapai 15%. Artinya, di tingkat lokal (provinsi) semakin sedikit caleg perempuan yang terpilih.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran kecenderungan perilaku pemilih di DKI Jakarta, pada bagian ini akan dibahas temuan survei yang dilakukan Puskapol UI pada Oktober – Desember 2014. Adapun survei tersebut dilakukan dengan dua tujuan. *Pertama*, untuk mengetahui dan memahami alasan pemilih di DKI Jakarta, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menetapkan caleg pilihannya. *Kedua*, untuk mengetahui persepsi politik pemilih tentang calon legislatif perempuan.

Responden survei ini adalah pemilih yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta, dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 9 April 2014 dengan cara mencoblos caleg, baik caleg laki-laki atau perempuan. Sebagai informasi, di Indonesia berlaku aturan bahwa pemilih dapat mencoblos nama kandidat saja, atau nama partai politik saja, atau nama kandidat dan nama partai politik yang sama. Survei ini memfokuskan pada pemilih yang memberikan suara untuk caleg

karena informasi utama yang diperlukan untuk analisis dalam survei ini adalah preferensi pilihan berbasis gender yang hanya dapat diidentifikasi jika responden mencoblis caleg. Jumlah responden adalah 520 orang yang terdiri dari 260 laki-laki dan 260 perempuan.

Survei ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan sampel secara random proporsional, dan ditarik dari daftar sampel yang berbasis rumah tangga (keluarga). Lokasi survei adalah Provinsi DKI Jakarta yang meliputi tiga daerah pemilihan (Dapil DKI)⁴ yaitu Dapil DKI 1 mencakup wilayah Jakarta Timur, Dapil DKI 2 mencakup Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, sementara Dapil DKI 3 meliputi wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Jumlah responden adalah 520 orang yang secara proporsional ditarik dari ketiga Dapil tersebut. Rincian jumlah responden untuk masing-masing Dapil adalah sebagai berikut: 160 responden untuk Dapil DKI 1, 160 responden untuk Dapil DKI 2, dan 200 responden untuk Dapil DKI 3.

Adapun tantangan utama dalam survei ini adalah mendapatkan proporsi berimbang antara responden yang memilih caleg perempuan dan responden yang memilih caleg laki-laki. Hal ini sebenarnya sudah dapat diantisipasi mengingat hasil perolehan suara untuk DPR RI pada Pemilu 2014 mencatat sebagian besar suara (76.69%) untuk caleg laki-laki.

Gambaran profil responden survei ini adalah mayoritas berusia antara 26 sampai dengan 55 tahun (71,5%). Sementara, sisanya sebanyak 19,2% (100 orang) berusia lebih tinggi dari 55 tahun, dan 9% (47 orang) berusia 17-25 tahun. Dilihat dari status perkawinan, mayoritas responden (89,4%) sudah menikah. Sementara sisanya sebanyak 9,6% responden belum menikah, dan 1% berstatus bercerai. Dari persebaran etnis, responden paling banyak berasal dari suku Betawi (37,7%) yang merupakan suku asli Jakarta, diikuti responden berlatar belakang suku Jawa (36,3%) Di luar kedua etnis mayoritas tersebut, terdapat responden yang berlatar belakang suku Sunda (16%), Minang (3,3%), Tionghoa (2,1%), Batak (1,3%), Bugis/Makassar (0,6%), dan Melayu (0,4%). Dilihat dari agama responden, mayoritas (94,4%) responden memeluk agama Islam, 3,5% responden beragama Kristen Protestan, 1,2% responden beragama Katolik 1,2% , dan 1% beragama Buddha.

Responden survei ini sebagian besar berpendidikan menengah yaitu 'tamam sekolah menengah' (64,6%). Sementara itu, terdapat 20,4% responden yang berpendidikan rendah yaitu tidak tamat SD sampai dengan tamat SD, dan 15% berpendidikan tinggi yaitu tamat diploma sampai dengan tamat pasca sarjana. Mayoritas berstatus bekerja (85,2%), dan sisanya (14,8%) mengaku tidak bekerja. Sementara dari status pekerjaan, mayoritas responden (94,3%) berstatus bukan pegawai negeri sipil, dan sejumlah kecil yang berstatus pegawai negeri sipil (5,7%). Dilihat dari jumlah pendapatan per bulan, umumnya (59,4%) mengaku memperoleh pendapatan antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp. 3.999.999; dan sisanya (29%) berpendapatan rendah yakni di bawah Rp. 1.000.000. Hanya sebagian kecil yang berpenghasilan antara Rp. 4.000.000,- sampai dengan 6.999.999,- juta (6,2%), lebih dari Rp. 10.000.000,- (3,7%), dan antara Rp. 7.000.000,- sampai dengan Rp. 9.999.999 (1,7%).

⁴Daerah Pemilihan (Dapil) adalah batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih.

B. Temuan Survei

B.1. Perilaku Pemilih: Potensi Keberpihakan terhadap Caleg Perempuan

Perilaku pemilih dipahami sebagai tingkah laku politik pemilih untuk mengetahui bagaimana dan mengapa keputusan memilih dalam pemilu dibuat. Dalam survei ini, perilaku pemilih diidentifikasi melalui dua variabel yakni alasan pemilihan caleg dan penilaian terhadap kualitas caleg. Kedua variabel ini diasumsikan menjadi pertimbangan utama dalam memilih caleg. Untuk menjelaskan kedua variabel ini, maka penjelasan dimulai dengan pembahasan tentang karakteristik responden yang memilih caleg perempuan, alasan memilih caleg, dan periode atau waktu memutuskan pilihan terhadap caleg yang akan dipilih.

1. Karakteristik Responden yang memilih Caleg Perempuan

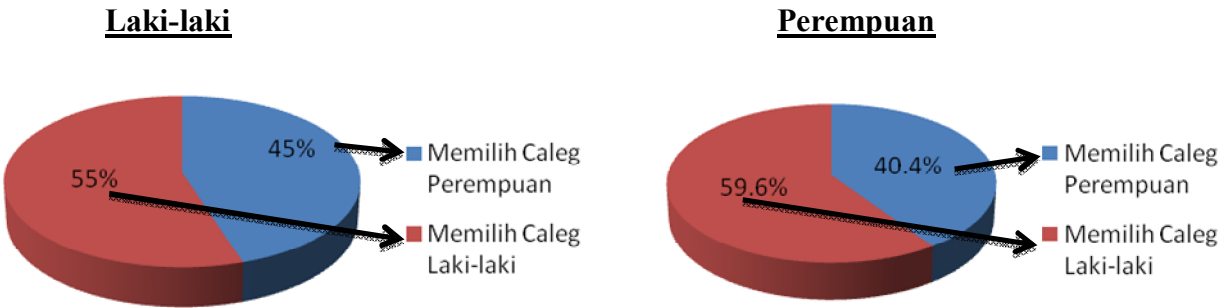
Dari 520 responden (yang terdiri dari 260 responden laki-laki dan 260 responden perempuan), diperoleh data bahwa sebanyak 42,7% memilih caleg perempuan, dan 52,3% memilih caleg laki-laki. Responden yang memilih caleg perempuan paling banyak terdapat pada Dapil DKI 2 (44,4%) sedangkan responden yang memilih caleg laki-laki kebanyakan terdapat pada Dapil DKI 1 (58,1%), dan Dapil DKI 3 (58%).

Dari pengolahan data diperoleh kecenderungan adanya potensi keberpihakan pemilih pada caleg perempuan disumbang oleh responden dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1. Berjenis kelamin perempuan
- 2. Berada dalam kelompok usia pemilih pemula (17-25 tahun) dan kelompok usia pemilih dewasa (26-55 tahun)
- 3. Berpendapatan tinggi (di atas Rp. 10.000.000,-)
- 4. Bekerja dengan struktur pekerjaan non-pegawai negeri
- 5. Berpendidikan menengah (tamat Sekolah Menengah)

Bagan III.1 di bawah ini menunjukkan kecenderungan serupa antara pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, yakni sebagian besar lebih memilih caleg laki-laki. Namun demikian, bagan tersebut juga menunjukkan bahwa pemilih perempuan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memilih caleg perempuan (45%) dibandingkan dengan pemilih laki-laki (40,4%). Artinya, keterpilihan caleg perempuan berpeluang lebih tinggi pada pemilih perempuan.

Bagan III.1
Perbandingan Jenis Kelamin Responden dalam Memilih Caleg



Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel III.1 di bawah ini, dari kelompok usia, status pekerjaan, dan tingkat pendidikan, jumlah pemilih yang memilih caleg laki-laki selalu lebih unggul dibandingkan pemilih caleg perempuan. Pengecualian ditemukan pada responden yang jumlah pendapatan per bulannya tinggi (di atas Rp 10.000.000,-); pemilih yang memilih caleg perempuan lebih unggul (58%) dibandingkan yang memilih caleg laki-laki (42%).

Tabel III.1
Karakteristik Responden dan Caleg yang Dipilih Responden

Kriteria Responden		Caleg yang Dipilih		Total
		Perempuan	Laki-laki	
Usia	17-25 Tahun	21 44.7%	26 55.3%	47 100.0%
	26-55 Tahun	163 43.8%	209 56.2%	372 100.0%
	> 55 Tahun	37 37.0%	63 63.0%	100 100.0%
	Total	221 42.6%	298 57.4%	519 100.0%
Status Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil	7 28.0%	18 72.0%	25 100.0%
	Pegawai Swasta	185 44.6%	230 55.4%	415 100.0%
	Total	192 43.6%	248 56.4%	440 100.0%
Pendapatan Per Bulan	Di bawah Rp 1.000.000	66 43.7%	85 56.3%	151 100.0%
	Rp 1.000.000 - Rp 3.999.999	128 41.4%	181 58.6%	309 100.0%
	Rp 4.000.000 – Rp 6.999.999	13 40.6%	19 59.4%	32 100.0%
	Rp 7.000.000 – Rp 9.999.999	4 44.4%	5 55.6%	9 100.0%
	Di atas Rp 10.000.000	11 57.9%	8 42.1%	19 100.0%
	Total	222 42.7%	298 57.3%	520 100.0%
Tingkat Pendidikan	Pendidikan Rendah	43 40.6%	63 59.4%	106 100.0%
	Pendidikan Menengah	152 45.2%	184 54.8%	336 100.0%
	Pendidikan Tinggi	27 34.6%	51 65.4%	78 100.0%

Kriteria Responden		Caleg yang Dipilih		Total
		Perempuan	Laki-laki	
	Total	222 42.7%	298 57.3%	520 100.0%

Dari segi usia, muncul kecenderungan bahwa **semakin muda usia responden maka semakin besar keberpihakan memilih caleg perempuan** dibandingkan caleg laki-laki. Responden yang memilih caleg perempuan ini berada pada kelompok usia antara 17-25 tahun (44,7%), dan kelompok usia antara 26-55 tahun (43,8%). Potensi pemilih caleg perempuan terutama pada kelompok usia antara 17-25 tahun sangat menjanjikan untuk peningkatan jumlah caleg perempuan di pemilu mendatang mengingat banyak dari mereka baru pertama kali menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014 ini.

Selain kedua kelompok usia tersebut, temuan survei memperlihatkan potensi keberpihakan terhadap caleg perempuan juga berasal dari responden yang bekerja dengan status pekerjaan non-pegawai negeri. **Responden yang bekerja pada struktur non-negara (bukan pegawai negeri) berpotensi untuk memilih caleg perempuan dibandingkan memilih caleg laki-laki.** Bila dibandingkan status pekerjaan responden, terdapat 44,6% responden yang bekerja dalam struktur non negara (bukan pegawai negeri) yang memilih caleg perempuan.

Tidak seperti usia, pengelompokan pendapatan per bulan responden tidak memiliki pola yang jelas dalam memilih caleg perempuan. Temuan di lapangan memperlihatkan responden yang memilih caleg perempuan adalah responden yang berasal dari kelompok yang berpenghasilan lebih dari Rp. 10.000.000,- (57,9%), antara Rp 7.000.000-Rp. 9.000.000,- (44,4%) dan di bawah Rp. 1.000.000,- (43,7%). Jumlah responden dalam ketiga kelompok ini memang hanya 279 responden (dari 520 responden).Namun, fenomena ini menarik untuk diungkapkan karena meskipun terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam pendapatan responden, mereka memiliki persamaan yaitu memilih caleg perempuan. Dengan perkataan lain, kelompok berpendapatan tinggi dan rendah memiliki keberpihakan lebih besar dalam memilih caleg perempuan (Lihat Tabel III.1).

Dari tiga kelompok tingkat pendidikan, hanya **responden yang berpendidikan menengah (tamat sekolah menengah) memiliki kecenderungan untuk memilih caleg perempuan** (45,2%).Ironisnya, responden yang berpendidikan tinggi (tamat pendidikan Diploma sampai dengan tamat pasca sarjana) **sangat rendah keberpihakannya dalam memilih caleg perempuan** yaitusebesar 34,6% dari responden saja.

2. Alasan Memilih Caleg: Mendukung atau Tidak Mendukung Perempuan

Setelah menelusuri karakteristik responden yang berpotensi memilih caleg perempuan, bagian ini akan memaparkan hasil survei perbandingan alasan responden memilih caleg perempuan atau caleg laki-laki, perbandingan penilaian responden terhadap kualitas caleg perempuan atau caleg laki-laki yang dipilihnya, serta pertimbangan utama dalam menilai caleg yang akan dipilih.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian Pendahuluan, terdapat 222 responden atau 42,7% yang memilih caleg perempuan, dan 298 responden atau 57,3% yang memilih caleg laki-laki.

Bagan berikut ini memperlihatkan alasan responden memilih caleg perempuan dan caleg laki-laki.

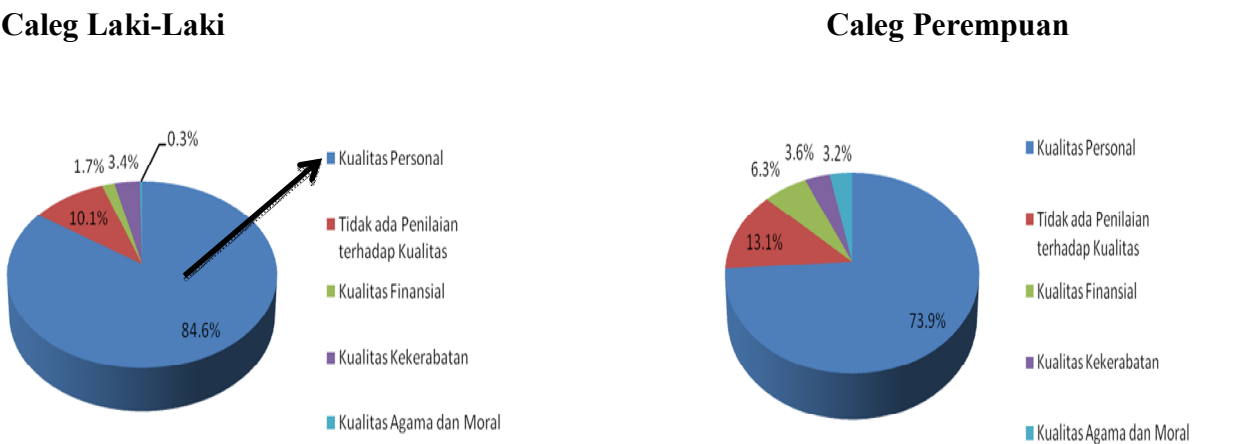
Bagan III.2
Alasan Responden Memilih Caleg



Bagan III.2 memperlihatkan bahwa pemilih caleg perempuan dan pemilih caleg laki-laki memiliki tiga alasan utama yang sama. Kebanyakan pemilih caleg perempuan (26,1%) dan pemilih caleg laki-laki (23,2%) memilih caleg karena dinilai caleg yang dipilih memiliki integritas. Selanjutnya, terdapat pemilih caleg perempuan (16,2%) dan pemilih caleg laki-laki (13,4%) yang beralasan memilih karena caleg memiliki visi misi yang jelas.

Temuan penting dalam survei muncul pada alasan responden yang memilih caleg laki-laki. Terdapat 9,1% responden yang memilih caleg laki-laki karena menilai perempuan tidak layak dipilih sebagai anggota legislatif. Artinya, meskipun tinggal di ibukota, masih ada pemilih yang bersikap menolak kepemimpinan perempuan di parlemen. Tiga alasan serupa yang dikemukakan oleh responden pemilih caleg perempuan maupun caleg laki-laki kelihatannya berkaitan erat dengan penilaian responden terhadap kualitas caleg yang dipilihnya. Bagan III.3 di bawah ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden perempuan (73,9%), dan mayoritas responden laki-laki (84,6%) menilai kualitas caleg yang akan dipilih berdasarkan kualitas personalnya. Sementara kualitas lainnya seperti kualitas kekerabatan, finansial serta moral, dan agama tidak signifikan persentasenya apabila dibandingkan dengan kualitas personal caleg.

Bagan III.3
Penilaian Kualitas Caleg oleh Responden



3. Penentuan Pilihan Responden: Tetap Memilih Caleg yang sama atau Berubah Pilihan

Survei ini juga menelusuri waktu penentuan caleg yang akan dipilih untuk melihat periode waktu yang diambil pemilih sebelum hari pencoblosan. Temuan survei memperlihatkan bahwa dari 560 responden, sebagian besar (41,9%) menentukan pilihan caleg pertama kali pada masa kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu 22 hari sebelum hari pemungutan suara. Sedangkan terdapat 37.9% responden menetapkan pilihan calegnya *pada hari pemungutan suara*, dan 10,6% responden menetapkan caleg pilihannya kurang lebih setahun sebelum pemungutan suara yaitu setelah Daftar Calon Tetap ditetapkan oleh KPU.

Penelusuran lebih mendalam dengan melihat jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir responden memperlihatkan perbedaandengan kecenderungan umum sebagaimana terangkum dalam Tabel III.3. Pada responden perempuan, sebagian besar (42,3%) menentukan caleg pilihannya pertama kali pada hari pemungutnan suara. Hal ini menunjukkan sebagian besar pemilih perempuan menentukan caleg pilihannya kemungkinan tanpa banyak memperhatikan visi dan misi atau program yang biasanya disampaikan pada masa kampanye.

Hal serupa ditemukan pada responden kelompok usia pemilih pemula (17-25 tahun) yang sebagian besar (57,4%) menentukan pilihan calegnya pertama kali pada hari pemungutan suara. Demikian pula responden yang berpendidikan tinggi, sebagian besar (42,3%) memutuskan caleg pilihannya pertama kali pada hari pemungutan suara.

Tabel III.2
Waktu Pertama Kali Menentukan Caleg yang Akan Dipilih
dilihat dari Jenis Kelamin, Usia dan Tingkat Pendidikan

Kriteria Responden		Kapan pertama kali menentukan caleg yang akan dipilih?				
		pemungutan suara	masa tenang	masa kampanye	Setelah DCT	Total
Jenis Kelamin	Laki-laki	87 33.5%	25 9.6%	117 45.0%	31 11.9%	260 100.0%
	Perempuan	110 42.3%	25 9.6%	101 38.8%	24 9.2%	260 100.0%
	Total	197 37.9%	50 9.6%	218 41.9%	55 10.6%	520 100.0%
Usia	17-25 Tahun	27 57.4%	3 6.4%	14 29.8%	3 6.4%	47 100.0%
	26-55 Tahun	136 36.6%	38 10.2%	160 43.0%	38 10.2%	372 100.0%
	> 55 Tahun	34 34.0%	9 9.0%	43 43.0%	14 14.0%	100 100.0%
	Total	197 38.0%	50 9.6%	217 41.8%	55 10.6%	519 100.0%

Kriteria Responden		Kapan pertama kali menentukan caleg yang akan dipilih?				
		pemungutan suara	masa tenang	masa kampanye	Setelah DCT	Total
Tingkat Pendidikan	Rendah	42 39.6%	12 11.3%	44 41.5%	8 7.5%	106 100.0%
	Menengah	122 36.3%	32 9.5%	142 42.3%	40 11.9%	336 100.0%
	Tinggi	33 42.3%	6 7.7%	32 41.0%	7 9.0%	78 100.0%
	Total	197 37.9%	50 9.6%	218 41.9%	55 10.6%	520 100.0%

Setelah menentukan caleg pilihannya, mayoritas responden (95,8%) tidak mengubah pilihan calegnya, dan hanya 4,2% responden mengaku telah mengubah pilihannya.

B.2. Persepsi Politik Pemilih

Setelah memaparkan dan menganalisis tentang Perilaku Pemilih Responden, bagian ini akan mendiskusikan mengenai persepsi politik responden khususnya yang memilih caleg perempuan. Adalah hal yang penting untuk menjelaskan persepsi politik ini karena persepsi inilah yang menjadi dasar dari pilihan politik mereka.

Persepsi politik responden diukur melalui tiga variabel yaitu tingkat pengetahuan mereka tentang kebijakan afirmatif yang telah diatur dalam UU Pemilu No. 12/2003 dan berlaku sejak pemilu 2004; melalui sikap responden terhadap kemampuan, kesempatan dan penjaminan hak caleg perempuan; dan cara caleg mencari informasi untuk menentukan pilihan, khususnya pilihan pada caleg perempuan

1. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Tindakan Afirmatif untuk Perempuan

Responden ditanyakan dua hal yang mendasar yaitu masa jabatan anggota legislatif, dan UU Pemilu yang mengatur kebijakan afirmatif bagi setiap partai politik untuk mencalonkan perempuan minimal 30% dalam Daftar Calon Tetap. Jawaban responden dari dua pertanyaan mendasar tersebut memperlihatkan hasil yang bertolak belakang. Jumlah responden yang mengetahui masa jabatan anggota DPR/DPRD adalah 5 tahun cukup tinggi (71%). Namun, jumlah responden yang mengetahui tentang kebijakan afirmatif ternyata cukup rendah (25,4%). Dengan kata lain, mayoritas responden (74,6%) masih tidak tahu tentang kebijakan afirmatif yang berlaku sejak Pemilu 2004. Temuan ini mengindikasikan masih sangat perlu sosialisasi dan pendidikan politik yang berkaitan dengan kebijakan afirmatif dalam pemilu.

Selanjutnya, dilakukan penelusuran lebih mendalam dari jenis kelamin responden dan jenis kelamin caleg yang dipilih responden. Mayoritas responden perempuan (82,3%) dan mayoritas responden laki-laki (66,9%) **tidak tahu** tentang kebijakan afirmatif dalam UU Pemilu tersebut. Sementara dilihat dari jenis kelamin caleg yang dipilih, persentasenya kurang lebih

berimbang antara responden yang memilih caleg perempuan (75,2%), dan yang memilih caleg laki-laki (74,2%) yang **tidak tahu** tentang kebijakan afirmatif. Dengan kata lain, mayoritas responden perempuan memang tidak mengetahui kebijakan afirmatif yang dijalankan sejak 10 tahun yang lalu.

Dikaitkan dengan adanya 25,4% responden yang memiliki pengetahuan tentang kebijakan afirmatif tersebut, sebagian (12,9%) menyatakan sangat setuju, dan sebagian besar (62,9%) menyatakan setuju. Penelusuran terhadap jenis kelamin responden, baik responden perempuan (75,2%) maupun laki-laki (74,2%) memiliki persentase yang relatif sama tinggi persetujuannya dengan kebijakan afirmatif untuk pencalonan perempuan. Namun bila dilihat dari jenis kelamin caleg yang dipilih responden, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara persentase responden pemilih caleg perempuan yang setuju (67,4%), dengan responden pemilih caleg laki-laki yang juga menyatakan setuju (60,5%) adanya kebijakan afirmatif.

2. Kemampuan, Kesempatan, dan Hak Politik Caleg Perempuan dibanding Caleg Laki-laki

Tabel III.5 di bawah ini memperlihatkan bahwa dari keseluruhan responden (520 orang) terdapat persentase yang relatif tinggi merujuk pada penilaian tentang kemampuan, kesempatan dan penjaminan hak politik caleg perempuan. Temuan ini penting karena memperlihatkan kecenderungan keberpihakan responden terhadap caleg perempuan yang juga tinggi.

Tabel III.3
Pendapat tentang kemampuan, kesempatan dan jaminan hak politik caleg perempuan dan caleg laki-laki untuk dipilih sebagai anggota Legislatif

Pendapat Responden				
	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Tidak ada Pendapat (%)	Total
Caleg perempuan mempunyai kemampuan sama dengan caleg laki-laki	76,2	21,3	2,5	100
Caleg perempuan sudah mendapatkan kesempatan yang sama dengan caleg laki-laki	75	21,3	3,7	100
Caleg perempuan harus dijamin haknya sama dengan caleg laki-laki	87,3	11	1,7	100

Dari ketiga pernyataan tersebut, hal yang menarik adalah mayoritas responden (87,3%) setuju terhadap keharusan penjaminan hak caleg perempuan dibandingkan caleg laki-laki untuk terpilih sebagai anggota DPR/DPRD. Data ini dapat ditafsirkan bahwa responden berpendapat *penjaminan hak caleg perempuan* merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan. Selanjutnya, terdapat 75% responden setuju pada pendapat tentang *caleg perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan caleg laki-laki*. Terakhir, sejumlah 76,2% responden setuju pada pendapat tentang *caleg perempuan mempunyai kemampuan sama dengan kemampuan caleg laki-laki*.

Apabila ketiga pernyataan ini dianalisis lebih mendalam dengan melihat jenis kelamin responden dan jenis kelamin caleg yang dipilih responden, terdapat pola yang sama dimana mayoritas responden perempuan dan yang memilih caleg perempuan setuju pada **keharusan penjaminan hak caleg perempuan sama dengan caleg laki-laki** untuk dipilih sebagai anggota DPR/DPRD, kesempatan yang sama yang diperoleh caleg perempuan dibandingkan dengan caleg laki-laki untuk dipilih sebagai anggota DPR/DPRD, dan kualitas yang sama antara caleg perempuan dengan caleg laki-laki untuk dipilih sebagai anggota DPR/DPRD.

3. Kampanye dan Sumber Informasi: Meningkatkan Persepsi untuk Memilih Caleg Perempuan

Aktivitas kampanye merupakan peristiwa penting dalam pemilu karena pada saat kampanye inilah pemilih berpeluang untuk berinteraksi secara langsung dengan calegnya. Dalam masa kampanye ini juga responden memilah-milah informasi yang diterima untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam memilih caleg. Selain kampanye, informasi tentang caleg juga tersedia dari berbagai sumber, baik dari media konvensional seperti televisi, surat kabar dan radio maupun media non-konvensional seperti internet dan *social media*. Karena itu, bagian ini akan mendiskusikan pengaruh kampanye dan sumber-sumber informasi ini meningkatkan persepsi responden memilih caleg perempuan.

Untuk aktivitas kampanye caleg, keseluruhan responden (520 responden) mengetahui bahwa baik caleg perempuan maupun caleg laki-laki melakukan kampanye di wilayahnya. Sebagaimana informasi tabel berikut ini.

Tabel III.4
Pengetahuan Responden terhadap Kampanye Caleg

Pengetahuan Responden	Caleg yang berkampanye di wilayah tempat tinggal responden	
	Caleg Perempuan	Caleg Laki-laki
Ada	271	309
%	52.1 %	59.4 %
Tidak Ada	185	151
%	35.6 %	29.0 %
Tidak Tahu	64	60
%	12.3 %	11.5 %
Total	520	520
%	100.0 %	100.0 %

Perbandingan persentase data dalam Tabel III.6 memperlihatkan paling tidak dua hal, yaitu: (1) Terdapat kemungkinan aktivitas caleg perempuan. Jadi wilayah responden tidak sebanyak aktivitas kampanye caleg laki-laki sehingga lebih banyak responden yang mengetahui aktivitas berkampanye dari caleg laki-laki (59,4%) daripada kegiatan kampanye caleg perempuan (52,1%); dan (2) aktivitas kampanye caleg perempuan umumnya tidak menggunakan cara-cara kampanye terbuka dan lebih pada menggunakan cara pertemuan ataupun pengajian sehingga responden tidak mengira bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan kampanye.

Menarik untuk dilihat perbandingan kegiatan berkampanye antara caleg perempuan dan caleg laki-laki. Tabel III.7 berikut ini memperlihatkan perbandingan bentuk kampanye caleg perempuan dan caleg laki-laki yang dilihat responden.

Tabel III.5
Perbandingan Bentuk Kampanye Caleg Perempuan dan Caleg Laki-Laki

Bentuk Kampanye Caleg	Perbandingan Bentuk Kampanye Caleg Perempuan dan Laki-laki menurut Responden	
	Caleg Perempuan	Caleg Laki-laki
Memasang spanduk %	56 20.7 %	97 31.4 %
Membagi-bagikan leaflet/brosur %	50 18.5 %	41 13.3 %
Mengadakan pertemuan dengan warga %	95 35.1 %	94 30.4 %
Mendatangi rumah warga %	23 8.5 %	28 9.1 %
Membagi-bagi uang %	3 1.1 %	1 0.3 %
Membagi-bagi barang %	25 9.2 %	32 10.4 %
Lain-lain %	19 7 %	16 5.2 %
Total %	271 100 %	309 100

Dari Tabel III.7 terlihat bahwa terdapat empat aktivitas utama yang dilakukan oleh caleg perempuan dan caleg laki-laki. Pertama, mengadakan pertemuan warga. Responden melihat caleg perempuan lebih sering mengadakan pertemuan warga (35,1%) dibandingkan dengan caleg laki-laki (30,4%). Kedua, memasang spanduk. Responden melihat caleg perempuan lebih jarang melakukan pemasangan spanduk (20,7%) dibandingkan dengan caleg laki-laki (31,4%). Ketiga, membagi-bagikan leaflet/brosur. Responden melihat caleg perempuan lebih sering membagi-bagikan leaflet/brosur (18,5%) dibandingkan dengan caleg laki-laki (13,3%). Keempat, membagi-bagikan barang. Responden lebih jarang melihat caleg perempuan membagi-bagikan barang (9,2%) dibandingkan caleg laki-laki (10,4%).

Rendahnya persentase responden yang melihat caleg perempuan berkampanye dibandingkan caleg laki-laki disebabkan caleg perempuan umumnya lebih banyak menggunakan bentuk-bentuk kampanye yang langsung menemui warga, seperti terlibat langsung dalam pengajian ibu-ibu dan arisan. Dengan begitu, ada kemungkinan responden tidak merasa kegiatan ini sebagai kegiatan kampanye. Apalagi terdapat kecenderungan caleg perempuan yang tidak memasang spanduk tentang dirinya, sehingga responden tidak mengetahui dengan pasti ketika caleg perempuan tersebut berkampanye di wilayahnya.

Di dalam survei ini tidak terungkap tentang pembagian uang secara masif oleh caleg perempuan maupun caleg laki-laki. Hanya 10,4% responden yang mengetahui caleg perempuan membagi-bagikan barang ketika berkampanye. Persentase ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan persentase responden yang mengetahui caleg laki-laki melakukan hal yang sama (9,2%).

Dari Tabel III.8 terlihat bahwa televisi adalah sumber informasi yang paling utama bagi responden dalam menentukan pilihan (39,8%). Selanjutnya, sumber lain adalah diskusi dengan *peer groups* (31,3%) –keluarga/teman/rekan kerja/tetangga – dan informasi dari materi kampanye yang diberikan oleh caleg (16,5%).

Tabel III.6
Sumber Informasi Utama Menentukan Pilihan

Sumber Informasi	Jumlah
Televisi	207 (39.8 %)
Koran	17 (3.3 %)
Radio	1 (0.2 %)
Internet	10 (1.9 %)
Media sosial	11 (2.1 %)
Materi kampanye dari KPU	3 (0.6 %)
Materi kampanye dari caleg	86 (16.5 %)
Diskusi dengan teman/rekan kerja/tetangga/keluarga	163 (31.3%)
Tidak tahu	9 (1.7 %)
Bertemu/berdiskusi dengan caleg secara langsung	13 (2.5 %)
Total	520 (100.0 %)

Penelusuran lebih dalam melalui variabel jenis kelamin responden dan jenis kelamin caleg yang dipilih responden memperlihatkan temuan-temuan berikut ini :

1. Untuk sumber informasi yang paling utama dalam menentukan pilihan politik, televisi masih merupakan pilihan bagi responden perempuan (43,1%) dan responden laki-laki (36,5%). Pilihan utama pada televisi ini persentasenya sedikit menurun pada responden yang memilih caleg perempuan (40,5%); sebaliknya, pilihan pada televisi ini sedikit meningkat pada responden yang memilih caleg laki-laki (39,3%).
2. Pada urutan kedua, sumber informasi yang berasal dari diskusi dengan teman/rekan kerja/tetangga/keluarga, temuan lapangan menunjukkan terdapat persentase yang relatif sama antara responden perempuan (31,2%) dan responden laki (31,5%) yang menggunakan informasi ini. Namun, pengaruh dari sumber informasi ini menurun baik pada responden yang memilih caleg perempuan (29,9%) dan responden yang memilih caleg laki-laki (31,3%).
3. Pada urutan ketiga, sumber informasi yang berasal dari materi kampanye dari caleg, temuan di lapangan menunjukkan terdapat 15% dari responden perempuan dan 18,1% responden laki yang paling ditentukan pilihannya oleh sumber informasi ini. Pengaruh dari sumber informasi ini menurun pada responden yang memilih caleg perempuan (14,4%). Sementara persentase responden yang memilih caleg laki-laki tetap yaitu sebesar 18,1% yang menggunakan sumber informasi ini.

Variabel usia responden dan tingkat pendidikan responden juga memperlihatkan tren yang sama terhadap sumber informasi utama yang berpengaruh dalam menentukan pilihan politiknya. Responden dari tiga kelompok usia yaitu kelompok usia pemilih pemula (34%), kelompok usia pemilih dewasa (40,3%), dan kelompok usia pemilih lanjut usia (41%), menjawab televisi sebagai media informasi yang paling utama mempengaruhi responden dalam menentukan pilih. Dari persentase tersebut dapat diinferensikan bahwa **semakin tinggi usia responden, televisi menjadi sumber utama untuk menentukan pilihan politik mereka.**

Pengecualian terjadi ketika variabel sumber informasi paling utama menentukan pilihan caleg oleh responden dikontrol dengan tingkat pendidikan responden. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa **semakin tinggi tingkat pendidikan responden, semakin rendah persentase responden yang dipengaruhi televisi sebagai sarana utama dalam menentukan pilihan mereka.**

Pada kelompok responden yang memilih informasi dari *peer groups* sebagai sumber informasi utama, pengecualian juga terjadi apabila dikontrol dengan variabel tingkat pendidikan responden. Temuan lapangan menunjukkan bahwa **semakin tinggi tingkat pendidikan responden, semakin tidak dipengaruhi oleh diskusi dengan *peer groups* (kelompok teman bermain).**

Selain tiga kategori jawaban di atas, hal yang juga menarik untuk dianalisis dalam kaitannya dengan *sumber informasi yang paling menentukan pilihan responden* adalah sangat rendahnya persentase responden yang menggunakan internet dan *social media*. Secara umum, temuan di lapangan menunjukkan bahwa hanya 4% responden yang menjawab internet dan media social sebagai sumber informasi paling utama dalam menentukan pilihannya. Hanya pada kontrol usia responden terdapat persentase yang cukup menjanjikan. Khususnya pada responden **kelompok ‘usia muda (17-25 tahun)’**, 17% responden yang menggunakan *social media* dan 6,4% yang menggunakan internet sebagai sumber informasi yang paling utama memengaruhi pilihan caleg mereka.

4. Peningkatan Jumlah Perempuan sebagai Anggota DPR/DPRD: Perlu atau Tidak Perlu

Persepsi responden terhadap caleg perempuan di tingkat empiris belum terlalu mendukung meskipun secara normatif sudah terbentuk. Kelihatannya caleg perempuan harus lebih asertif untuk lebih menampakkan diri.

Dari 520 responden, sebagian besar (64,8%) menganggap perlu peningkatan jumlah caleg perempuan terpilih sebagai anggota DPR/DPRD untuk masa mendatang. Penelusuran dengan *variabel jenis kelamin* dan *jenis kelamin caleg yang dipilih responden*, memperlihatkan bahwa persentase responden perempuan yang berpendapat perlu peningkatan jumlah tersebut lebih tinggi (67,7%) dari persentase responden laki-laki yang berpendapat sama (61,9%). Perbedaan persentase yang tersebut lebih jelas terlihat pada responden yang memilih caleg perempuan (71,6%) dibandingkan dengan responden yang memilih caleg laki-laki (59,7%).

Selanjutnya, penelusuran dengan kontrol tingkat pendidikan terakhir responden memperlihatkan bahwa **semakin tinggi pendidikan, responden semakin menganggap perlu peningkatan jumlah caleg perempuan terpilih sebagai anggota DPR/DPRD di masa mendatang.** Perbandingan persentasenya adalah sebagai berikut: responden pendidikan tinggi (66,7%), responden pendidikan menengah (66,1%) dan responden pendidikan rendah (59,4%).

Penelusuran lebih mendalam dengan variabel jenis kelamin responden dan jenis kelamin caleg yang dipilih responden dalam kategori tingkat pendidikan terakhir responden memperlihatkan dua temuan menarik:

1. Terdapat 70,7% responden *perempuan berpendidikan menengah* dan 69,7% responden *perempuan berpendidikan tinggi* berpendapat jumlah caleg perempuan perlu

ditingkatkan untuk masa mendatang. Persentase ini **lebih tinggi** bila dibandingkan dengan persentase responden *laki-laki yang berpendidikan menengah* (61,6%) dan responden *laki-laki berpendidikan tinggi* (64,4%) yang juga mendukung jumlah caleg perempuan perlu ditingkatkan.

2. Responden yang memilih caleg perempuan dengan latar belakang pendidikan rendah (72,1%), *berlatar belakang pendidikan menengah* (71,7%), dan *berlatar belakang pendidikan tinggi* (72,1%), berpendapat bahwa jumlah caleg perempuan perlu ditingkatkan untuk masa mendatang. Persentase ini **jauh lebih unggul** apabila dibandingkan dengan persentase *responden yang memilih caleg laki-laki dengan latar belakang pendidikan rendah* (61,4%), *berlatar belakang pendidikan menengah* (64,7%) dan *berlatar belakang tinggi* (50,8%) yang juga mendukung peningkatan jumlah caleg perempuan untuk masa mendatang.

Kedua temuan tersebut memberi indikasi yang positif bahwa pemilih perempuan yang berpendidikan menengah dan tinggi, serta pemilih caleg perempuan yang berpendidikan rendah hingga tinggi memiliki kecenderungan yang lebih besar memilih caleg perempuan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, dari 337 responden (64,6%) yang menjawab *perlu peningkatan jumlah caleg perempuan terpilih sebagai anggota DPR/DPRD untuk masa depan*, 60,4% responden berpendapat cara peningkatannya melalui meningkatkan keaktifan caleg perempuan dibanding caleg laki-laki; 21,1% responden berpendapat partai politik bertanggung jawab membuat peraturan untuk meningkatkan jumlah caleg perempuan terpilih; dan 18,5% responden berpendapat melakukan pendidikan politik bagi pemilih untuk memilih caleg perempuan (lihat Tabel III.9). Dengan kata lain, agar jumlah anggota perempuan mereka meningkat di DPR/DPRD, responden berpendapat caleg perempuan yang harus lebih aktif dibandingkan caleg laki-laki; responden kurang melihat bahwa peningkatan jumlah caleg perempuan juga merupakan tanggung jawab partai politik di internal partai dan bagaimana partai politik melakukan pendidikan politik untuk konstituennya. Hal ini mengindikasikan persepsi politik responden yang melihat peningkatan jumlah caleg perempuan lebih merupakan konsekuensi kinerja personal ketimbang tanggung jawab institutional partai politik.

Tabel III.7
Cara Peningkatan Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR/DPRD
Menurut Responden

No	Pendapat	Persen
1	Caleg perempuan harus lebih aktif dari caleg laki-laki agar terpilih sebagai anggota DPR/DPRD	60,4
2	Pendidikan politik bagi pemilih untuk memilih caleg perempuan	18,5
3	Partai politik harus membuat peraturan untuk meningkatkan jumlah caleg perempuan sebagai anggota DPR/DPRD	21,1

Dari pembahasan tentang profil responden, perilaku pemilih dan persepsi politik pemilih, maka dapatlah ditarik kesimpulan atas temuan survei sebagai berikut:

1. Karakteristik utama responden yang berpihak terhadap caleg perempuan bertumpu pada pemilih perempuan, usia pemilih pemula dan usia dewasa, berpendapatan

- ekstrim tinggi, berstatus non-pegawai negeri sipil dan berpendidikan menengah.
2. Karakteristik perilaku pemilih responden perempuan dan laki-laki sama-sama lebih mengutamakan kualitas personal caleg daripada visi dan misi, serta afiliasi terhadap partai politik. Ini memperlihatkan lemahnya identifikasi responden kepada partai politik.
 3. Karakteristik persepsi politik pemilih:
 - a. Tidak adanya keterkaitan antara pengetahuan tentang kebijakan afirmatif dengan persepsi politik pemilih tentang caleg perempuan.
 - b. Persepsi politik pemilih cenderung terbentuk secara normatif sebagaimana terekam dalam sejumlah respons positif terhadap pernyataan-pernyataan tentang kesetaraan gender.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa ada sejumlah relevansi untuk meneliti perilaku pemilih pada pemilu-pemilu di era reformasi ini, khususnya Pemilu 2014. Perubahan posisi pemilih dalam kepemiluan, yang selama pemilu-pemilu Orde Baru berada di pinggiran karena mobilisasi politik untuk memenangkan partai pendukung pemerintah, kini pada era reformasi posisi pemilih berada di tengah pusaran berbagai kepentingan. Pemilih memiliki peran strategis dalam menentukan partai politik atau caleg mana yang memperoleh suara terbanyak untuk merebut kursi. Dengan posisi tersebut, perilaku pemilih menjadi layak untuk dicermati, dan bagi penyelenggara pemilu menjadi salah satu komponen dalam melihat keberhasilan pelaksanaan sosialisasi pemilu.

Penelitian ini menemukan sejumlah poin kesimpulan yang menggambarkan kecenderungan perilaku pemilih di DKI Jakarta, dan khususnya di kota Jakarta Selatan. *Pertama*, umumnya pemilih di Jakarta Selatan lebih banyak yang memberikan suara pada caleg daripada untuk partai politik. Meski demikian ada perbedaan selisih suara pemilih yang diberikan untuk caleg dan partai politik jika dilihat dari tingkatan legislatif. Untuk pemilihan anggota DPR RI, sekalipun pemilih lebih banyak memberikan suaranya untuk caleg, tetapi hanya berbeda sedikit dengan yang mencoblos partai politik (antara 52% coblos caleg dan 48% coblos partai). Data tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan perilaku pemilih untuk memilih anggota DPRD DKI. Kecenderungan dari hasil pemilu memperlihatkan selisih antara yang mencoblos caleg DPRD DKI lebih banyak daripada yang memberikan suara untuk partai politik (60% coblos caleg, 40% coblos partai).

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilih di Jakarta Selatan cenderung berkeinginan untuk memberikan suaranya pada caleg. Alasan utama lebih memilih orang daripada partai adalah dianggap lebih mudah dalam menagih janji dan lebih jelas kemana suaranya akan diberikan. Tetapi data tersebut juga bisa ditafsirkan sekalipun memilih caleg lebih banyak, namun belum bisa dikonfirmasi bahwa pemilih mengetahui dengan baik atau mengenal rekam jejak caleg yang dipilihnya. Maka masih signifikan juga pemilih yang condong memberikan suara pada partai politik karena tidak kenal dengan semua caleg yang ada di surat suara.

Kedua, temuan data hasil perolehan suara di Jakarta Selatan menunjukkan bahwa dukungan suara untuk caleg laki-laki lebih banyak daripada untuk caleg perempuan. Kondisi tersebut terjadi untuk tingkat DPR, DPD, dan DPRD, sekalipun untuk tingkat DPR, dukungan suara pemilih untuk caleg perempuan lebih banyak dibandingkan untuk DPRD. Untuk DPR RI, dari total pemilih yang memilih caleg, sebagian besar (65%) memberikan suara untuk caleg laki-laki, dan sisanya untuk caleg perempuan (35%). Dukungan suara terhadap caleg perempuan lebih rendah dalam pemilu anggota DPD, yaitu 79,6% suara pemilih untuk calon DPD laki-laki dan sisanya untuk calon DPD perempuan. Sekalipun mayoritas suara pemilih di Jakarta Selatan untuk calon DPD laki-laki, tetapi jika dilihat dari jumlah calon anggota DPD perempuan yang berdomisili di Jakarta Selatan hanya 3 orang maka perolehan suara pemilih untuk calon DPD perempuan sangat signifikan. Bahkan mampu mengantarkan satu perempuan calon anggota DPD terpilih sebagai salah satu dari empat anggota DPD dari DKI Jakarta dengan suara terbanyak

untuk daerah Jakarta Selatan sebesar 121.657 suara. Sementara untuk DPRD DKI, baik dapil 7 dan dapil 8, mayoritas suara pemilih diberikan pada caleg laki-laki (rata-rata 75%).

Data masih rendahnya dukungan suara pemilih untuk caleg perempuan sehingga berpengaruh pada minimnya jumlah caleg perempuan yang terpilih, menunjukkan pemilih belum melihat faktor jenis kelamin sebagai alasan memberikan dukungan suara. Pada temuan riset Puskapol UI (2014) mengenai perilaku memilih dan persepsi politik pemilih terhadap caleg perempuan di DKI Jakarta semakin menguatkan kecenderungan tersebut. Dukungan pemilih terhadap caleg perempuan sesungguhnya cukup signifikan dan potensial untuk bisa meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif pada pemilu mendatang. Dari survei Puskapol tersebut diperoleh hasil bahwa responden di Dapil DKI 2 untuk DPR (Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan) yang paling banyak memilih caleg perempuan (44%), dibandingkan pemilih di dapil 1 dan dapil 3. Dukungan pemilih perempuan lebih signifikan untuk memilih caleg perempuan. Dari temuan survei tersebut menunjukkan di kalangan pemilih laki-laki yang memberikan suaranya untuk caleg perempuan sebanyak 40%, sedangkan di kalangan pemilih perempuan yang memberikan suara pada caleg perempuan adalah sebanyak 45%. Artinya pemilih perempuan masih merupakan 'basis massa potensial' bagi caleg perempuan. Survei tersebut juga memetakan potensi keberpihakan pemilih pada caleg perempuan adalah kelompok pemilih yaitu pemilih perempuan, pemilih yang berada dalam kelompok usia pemilih pemula (17-25 tahun), berpendidikan menengah, dan berpendapatan cenderung tinggi.

Kesimpulan berikutnya adalah partisipasi pemilih perempuan di Jakarta Selatan ternyata lebih tinggi daripada pemilih laki-laki. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan mencapai 68%, sedangkan partisipasi pemilih laki-laki adalah 62%. Pesanggrahan dan Jagakarsa tercatat sebagai dua kecamatan di Kota Jakarta Selatan yang tertinggi tingkat partisipasi pemilih perempuannya di Jakarta Selatan, yaitu sama-sama mencapai 71%. Data tersebut sangat menarik dan bisa menjadi bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sosialisasi pemilu di Jakarta Selatan, dan untuk merancang kegiatan sosialisasi pada pemilu berikutnya termasuk pilkada DKI pada 2017. Secara umum gambaran partisipasi pemilih tersebut menunjukkan bahwa akses perempuan dalam kegiatan pemilu relatif tidak ada persoalan di wilayah Jakarta Selatan. Mestinya hal tersebut tidak terbatas pada keterlibatan sebagai pemilih, namun juga menjadi pertimbangan KPU untuk merekrut lebih banyak perempuan untuk menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain bisa pula dibaca adanya karakteristik tertentu di setiap kecamatan yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih. Misalnya terkait dengan mobilitas penduduknya, pengaruh kepemimpinan tokoh masyarakat, kondisi geografis, dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, program sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU dari nasional hingga kabupaten/kota menjadi sangat strategis untuk meningkatkan kesadaran pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Untuk itu ada sejumlah rekomendasi yang bisa diusulkan untuk KPU, khususnya untuk KPU DKI Jakarta beserta jajarannya di berbagai wilayah, dalam menghadapi pemilu-pemilu mendatang termasuk pemilihan kepala daerah pada 2017.

Pertama, relatif tingginya partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada pemilu 2014 (rata-rata di atas 65%) harus diimbangi dengan strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilu yang berorientasi pada kepentingan pemilih dan memberdayakan pemilih dalam berhadapan dengan kepentingan peserta pemilu. Pemilih sudah berupaya maksimal dalam

melakukan pilihannya, yaitu tidak ‘sekedar’ memilih tanda gambar partai tetapi juga berusaha untuk bisa mencoblos orang/caleg sehingga ada kedekatan ‘jarak’ antara pemilih dengan yang dipilih. Walaupun terbatas dengan informasi yang belum memadai seputar rekam jejak calon berikut program dan platform partai politik.

Kedua, analisis terhadap rekapitulasi suara pemilih bermanfaat untuk membuat pemetaan karakteristik wilayah, penduduk, dan performa penyelenggara di tingkat bawah (panitia pemilu di kelurahan dan TPS). Data yang diolah dari kecamatan di Jakarta Selatan menunjukkan pemetaan sangat diperlukan agar dapat merancang metode dan materi sosialisasi pemilu yang berorientasi pada pemilih. KPU bisa merancang kegiatan sosialisasi pemilih yang bersifat generik/umum berlaku pada semua wilayah dan semua latar belakang pemilih dengan indikator capaian yaitu penyebarluasan informasi terkait penyelenggaraan tahapan pemilu yang memerlukan keterlibatan warga/pemilih. Selain yang bersifat umum, KPU juga merancang sosialisasi pemilu dengan memperhatikan kebutuhan kelompok sasaran dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi kelompok bersangkutan. Untuk menentukan kelompok sasaran, bisa berbasis pada data hasil pemilu yang dipilah, misalnya atas dasar jenis kelamin, wilayah terendah yaitu kelurahan, dan catatan terhadap jumlah surat suara tidak sah di tiap kelurahan.

Ketiga, selama ini program sosialisasi pemilu umumnya mengikuti tahapan pemilu yang menyebabkan periode sosialisasi menjadi pendek. Program sosialisasi pemilu bisa mengacu pada siklus yang berbeda dengan tahapan penyelenggaraan, yaitu mengacu pada momen lima tahunan seperti pra/sebelum pemilu – pemilu – pascapemilu. Dengan demikian, program sosialisasi bisa dirancang dalam secara jangka panjang dan bisa diukur efektivitasnya dengan melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan.

Keempat, koordinasi di antara penyelenggara pemilu dalam melakukan sosialisasi pemilu sangat penting. Dalam hal ini sinergi antara KPU dan Bawaslu dalam segi materi-materi tertentu dan kelompok sasaran sosialisasi pemilu, sangat dianjurkan. Termasuk dengan pihak pemerintah daerah yang juga memiliki program dan anggaran sosialisasi pemilu. Koordinasi dan sinergi dalam hal materi, waktu, metode, dan kelompok sasaran sosialisasi pemilu antara berbagai instansi yang memiliki anggaran sosialisasi pemilu dapat menghimpun kekuatan yang besar sehingga kesadaran dan partisipasi pemilih bisa terus meningkat, bukan hanya jumlah yang menggunakan hak pilih melainkan juga kualitas partisipasi politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. *Pemilu 2014 Dalam Angka*. Jakarta : KPU Provinsi DKI Jakarta, 2014.

Creswell, John. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Ritche, Jane & Lewis, Jane (Ed.). *Qualitative Research Practices : A Guide for Social Science Students and Researchers*. London : Sage Publications, Ltd, 2003.

Data Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 :

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Provinsi)

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 (Model DB-1 DPD)

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DB-1 DPR)

Data Badan Pusat Statistik :

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. *DKI Jakarta Dalam Angka 2014*. Diunduh melalui <http://jakarta.bps.go.id/backend/pdf/publikasi/Statistik-Daerah--Provinsi-DKI-Jakarta-2014.pdf>. Diakses pada 8 Juli 2015.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Administrasi Tahun 2009-2013*. Diunduh melalui <http://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/59>. Diakses pada 9 Juli 2015.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Administrasi Tahun 2009-2013*. Diunduh melalui <http://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/53>. Diakses pada 9 Juli 2015.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta Tahun 2011-2013*. Diunduh melalui <http://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/85>. Diakses pada 9 Juli 2015.

Laporan Hasil Survei Perilaku Pemilih :

Poltracking. Desember 2013. *Kecenderungan Sikap dan Perilaku Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014*. Diunduh melalui <http://poltracking.com/images/content/pdf/KECENDERUNGAN-PERILAKU-PEMILIH-DALAM-PEMILU-LEGISLATIF-2014.pdf>. Diakses pada 31 Juli 2015

Cirus Surveyor Group. Maret 2014. *Posisi Partai dan Capres Satu Bulan Menjelang Pemilu 2014*. Diunduh melalui <http://www.cirus-sg.or.id/wp-includes/images/Laporan3-2014.pdf>. Diakses pada 31 Juli 2015

Wawancara :

Muhammad Ikbal. Ketua KPU Jakarta Selatan. 18 Juni 2015

Deti Kurniawati. Anggota KPU Jakarta Selatan. 18 Juni 2015

Agus Sudono. Anggota KPU Jakarta Selatan. 18 Juni 2015

Betty Epsilon Idroos. Anggota KPU DKI Jakarta. 22 Juni 2015

Faisal Romdonih. Relasi Komunitas Keagamaan. 24 Juni 2015

Abdur Rochman. Relasi Komunitas Keagamaan. 25 Juni 2015

Abdul Aziz. Relasi Komunitas Marjinal. 25 Juni 2015

Azhar Dini. Relasi Komunitas Perempuan. 26 Juni 2015

Tuti Mardiana. Relasi Komunitas Perempuan. 27 Juni 2015

Arief. Relasi Komunitas Disabilitas. 27 Juni 2015

Dedes Seruni. Relasi Komunitas Pemilih Pemula. 27 Juni 2015